



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <http://dpp.pesisirselatankab.go.id> / Pos- el dpp@pesisirselatankab.go.id

Painan, 16 September 2026

Nomor : 700.1.2.1/327/DPP-PS/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengantar Tindak Lanjut LHE 2026

Kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
di

Painan

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 700.1.2.1/881/INSP/2026 tanggal 29 Juli 2026, maka bersama surat ini dikirimkan tindak lanjut LHE Dinas Perikanan dan Pangan, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Dinas,



ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19761006 200312 1 003

Disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip

**MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres	Koordinator	Eviden
1	Perencanaan Kinerja							
	a. Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan unsur menantang, dan menjadikan capaian kinerja triwulan sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan merumuskan target kinerja berikutnya	Merumuskan Perjanjian Kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya dalam merumuskan target kinerja.	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris	LHE R.1.a Perjanjian Kinerja
	b. Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Melaksanakan rapat pengendalian dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris	LHE R.1.b Rapat Pengendalian dan evaluasi
	c. Menyelaraskan dokumen perencanaan antara Renstra, PK, IKU dan Cascading/pohon kinerja yang disusun.)	Menyelaraskan dokumen PK, IKU dan Cascading dengan Renstra	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris	LHE R.1.c Perjanjian Kinerja, IKU dan Cascading
2	Pengukuran Kinerja							
	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Melakukan rapat Pengendalian dan evaluasi	2. Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas	Belum Selesai	Sekretaris	LHE R.2 Rapat Pengendalian dan Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja							
	a. Agar dokumen Laporan Kinerja digunakan untuk perbaikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan kinerja berikutnya.	Menyusun Laporan Kinerja Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi	1 Dokumen	1 Tahun	Kepala Dinas	Telah Selesai	Sekretaris	LHE R.3 Laporan Kinerja

	b. Memastikan penyajian informasi d alam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Inspektorat Daerah						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Painan, 16 September 2026
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19761006 200312 1 003



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. HENDRAJONI, SH., M.H.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 10 Februari 2026

PIHAK KEDUA

BUPATI PESISIR SELATAN



(H. HENDRAJONI, S.H., M.H.)

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



(ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si)

NIP. 19761006 200312 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan serta meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	- Indeks Ketahanan Pangan	88,23
		- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	86 %
	- Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	- Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (81,75)
	- Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	- Nilai Kematangan Inovasi PD	81
	- Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	- Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,7
	- Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	- Jumlah Produksi Perikanan	63.304,20

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.581.028.719	-
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 755.157.020	-
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 35.000.170	-
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 29.000.200	-
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 990.146.010	-
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 439.990.979	-
7	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 95.034.950	-
Jumlah		Rp7.925.358.048	-

Painan, 10 Februari 2026

Pihak Kedua
BUPATI PESISIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

(ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si)
NIP. 19761006 200312 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

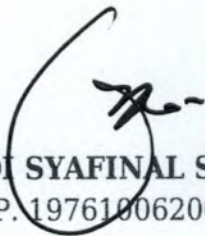
Nama : **YUSMAJOYO S.PD.MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Dinas Perikanan Dan Pangan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

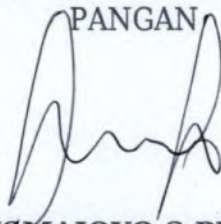
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN

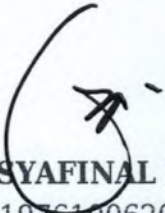

YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

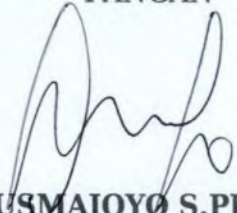
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0,18%
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	100
		Jumlah Inovasi	1

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 5.581.028.719
Total Anggaran		Rp 5.581.028.719

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN


YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RENI SUSANTI S.PI, M.SI**

Jabatan : Perencana Ahli Muda / Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSMAJOYO S.PD.MM**

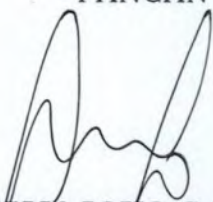
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

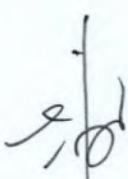
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN


YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PERENCANA AHLI MUDA / MUDA


RENI SUSANTI S.PI, M.SI
NIP. 197504172007012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Persentase kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100
	- Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Persentase Kelengkapan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN


YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PERENCANA AHLI MUDA / MUDA


RENI SUSANTI S.PI, M.SI
NIP. 197504172007012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ROSI NORA MAI LIZA S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSMAJOYO S.PD.MM**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN

YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

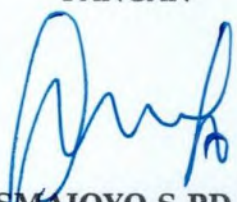
ROSI NORA MAI LIZA S.IP
NIP. 197705022007012010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100
	- Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100
	- Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100
	- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum dan Kepegawaian	100
	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100
	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100

No	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 9.606.880
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 21.900.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 210.351.326
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 523.933.314
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 163.180.000
Total Anggaran		Rp 928.971.520

PIHAK KEDUA,
 SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
 PANGAN


YUSMAJOYO S.PD.MM
 NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
 PIHAK PERTAMA,
 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


ROSI NORA MAI LIZA S.IP
 NIP. 197705022007012010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RANDI FITRIADI S.PI, M.SI**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSMAJOYO S.PD.MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN

YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan

RANDI FITRIADI S.PI, M.SI
NIP. 199204052019031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan		
-	Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan	4 Dokumen	4 Dokumen
-	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN



YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan



RANDI FITRIADI S.PI, M.SI
NIP. 199204052019031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MAYA FITRI ZULY S.PI**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **YUSMAJOYO S.PD.MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

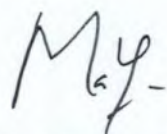
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN


YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan


MAYA FITRI ZULY S.PI
NIP. 199612302020122016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

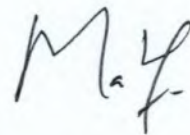
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan		
-	Dokumen SPP SPM LS GAJI DAN TPP	12 Dokumen	12 Dokumen
-	Dokumen Dana Up, GU dan TU	12 Dokumen	12 Dokumen
-	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Laporan Rekonsiliasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen
-	Register TPB	1 Dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN
PANGAN



YUSMAJOYO S.PD.MM
NIP. 197206052007011010

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan



MAYA FITRI ZULY S.PI
NIP. 199612302020122016



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Syaifuddin A**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rosi Nora Mai Liza, S.IP**
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA TATA USAHA

ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SYAIFUDDIN A
NIP. 19720104 199308 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan umum dan Kepegawaian	1. Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi dan proses pengajuan KGB, Tunjangan Pegawai, tanda jasa/penghargaan kepada PNS, sumpah PNS, kenaikan jabatan fungsional dan Cuti Pegawai 2. Jumlah kegiatan administrasi dan proses usulan pensiun	12 Dokumen 12 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Tata Usaha

(ROSI NORA MAI LIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010

Painan, 14 Januari 2026
Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

(SYAIFUDDIN. A)
NIP. 19720104 199308 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **EDA PUTRI SANTI S.PI**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ROSI NORA MAI LIZA S.IP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


ROSI NORA MAI LIZA S.IP
NIP. 197705022007012010

Painan, 14 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan


EDA PUTRI SANTI S.PI
NIP. 199210012019032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

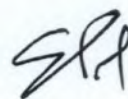
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian		
-	Rekapitulasi Arsip Dinas Perikanan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ROSI NORA MAI LIZA S.IP
NIP. 197705022007012010

Painan, 14 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan



EDA PUTRI SANTI S.PI
NIP. 199210012019032002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rozi Yusrialdi, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rosi Nora Mai Liza, S.IP**
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Januari 2026

Pihak/Kedua
KEPALA TATA USAHA

ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

ROZI YUSRIADI, S.Pi
NIP. 19910131 201001 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpeliharanya aset atau inventaris dan pengamanan data serta pelaporan aset kantor atau inventaris kantor Pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor dan kendaraan dinas Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian	1. Jumlah Aset Kantor yang terdokumentasi 1. Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1. Jumlah terlaksananya rekonsiliasi data Barang Milik Daerah 2. Jumlah penyusunan laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen 32 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Tata Usaha

(ROSI NORA MAI LIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010

Painan, 14 Januari 2026
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(ROZI YUSRIADI, S.Pi)
NIP. 19910131 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Syamsuardi**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rosi Nora Mai Liza, S.IP**
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA TATA USAHA


ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


SYAMSUARDI
NIP. 19740414 200801 1 016

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	1. Jumlah Pengagendaan Surat Masuk dan Keluar 2. Jumlah kegiatan menyiapkan dan melaporkan daftar hadir pegawai 3. Jumlah Dokumentasi Persiapan Perlengkapan Apel	12 Bulan 12 Dokumen 12 Bulan

Pihak Kedua
Kepala Tata Usaha

(ROSI NORA MAI LIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010

Painan, 14 Januari 2026
Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

(SYAMSUARDI)
NIP. 19740414 200801 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Yosrianto**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Rosi Nora Mai Liza, S.IP**

Jabatan : Kepala Tata Usaha

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
KEPALA TATA USAHA

ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

YOSRIANTO
NIPPPK. 19780815 202521 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya kebijakan pelaksanaan program pelayanan Umum dan Kepegawaian	1. Jumlah kegiatan melaksanakan entry data kepegawaian di aplikasi SIMPEG 2. Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi penilaian kinerja pegawai 3. Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi dan proses pengajuan kenaikan pangkat pegawai	35 Data 12 Dokumen 12 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Tata Usaha

(ROSI NORA MAI LIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010

Painan, 14 Januari 2026
Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

(YOSRIANTO)
NIPPPK. 19780815 202521 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **APT. FITRIA S.FARM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Stabilisasi Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN


APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	2600
		Angka Ketersediaan Protein	72

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 669.156.960
Total Anggaran		Rp 669.156.960

PIHAK KEDUA,
 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
 NIP. 197610062003121003

Painan, 30 April 2026
 PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
 DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN


APT. FITRIA S. FARM
 NIP. 197902232005012009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ASWITA S.ST**

Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda / Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **APT. FITRIA S.FARM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Stabilisasi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232003012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
/ MUDA

ASWITA S.ST
NIP. 197609122006042008

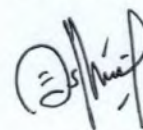
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan	100
	- Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	10
		Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan	8
2	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Persentase Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	20
	- Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan	56,32

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
/ MUDA



ASWITA S.ST
NIP. 197609122006042008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **HENDRA SYAFUTRA S.PI**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **APT. FITRIA S.FARM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Stabilisasi Pangan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan


HENDRA SYAFUTRA S.PI
NIP. 198102162014071002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah		
-	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Pengelolaan dan penyimpanan Cadangan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen
-	Penyaluran Cadangan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan


HENDRA SYAFUTRA S.PI
NIP. 198102162014071002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NILAM SARI TANJUNG S.E.**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **APT. FITRIA S.FARM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Stabilisasi Pangan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan

NILAM SARI TANJUNG S.E.
NIP. 199712092020122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
-	Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil	1 kelompok	1 Kelompok
-	Laporan Informasi harga pangan tingkat produsen wilayah kabupaten/kota	12 laporan	12 Laporan
-	Laporan trend harga pangan pokok tingkat produsen di wilayah kabupaten kota	12 laporan	12 Laporan

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Penelaah Teknis Kebijakan


NILAM SARI TANJUNG S.E.
NIP. 199712092020122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **JUNNIK HASYIM**

Jabatan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **APT. FITRIA S.FARM**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Dan Stabilisasi Pangan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

JUNNIK HASYIM
NIP. 197706162025211002

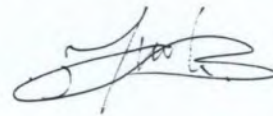
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah		
-	Laporan administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Pengelolaan dan penyaluran CPP	12 dokumen	12 Dokumen
-	Arsip serta dokumen penting di lingkungan unit kerja agar mudah diakses saat dibutuhkan.	12 dokumen	12 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN,
DISTRIBUSI DAN STABILISASI PANGAN

APT. FITRIA S.FARM
NIP. 197902232005012009

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA



JUNNIK HASYIM
NIP. 197706162025211002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **AFRIKAL, SH**

Jabatan : Kepala Bidang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197619062003121003

Painan, 14 Februari 2026

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG


AFRIKAL, SH
NIP. 196905101991031010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

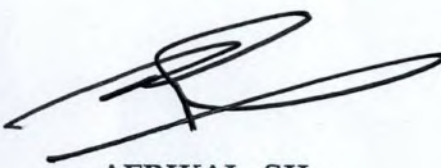
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	47.263,50
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	35,69
		Produksi Olahan Hasil Perikanan	324,99 ton

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 990.146.010
2	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 95.034.950
Total Anggaran		Rp 1.085.180.960

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Painan, 14 Februari 2026
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003


AFRIKAL, SH
NIP. 196905101991031010



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Silvina Granita, S.Pi**
Jabatan : **Pengelola Produksi Perikanan Tangkap**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

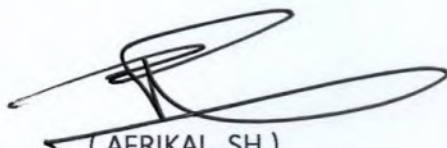
SILVINA GRANITA, S.Pi
NIP. 19760627 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Jabatan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan Pemberdayaan Nelayan Kecil	- Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	15 orang
		- Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan kemitraan usaha	5 kelompok

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan,


(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1010

Pihak Pertama
JFT Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Ahli Muda,


(SILVINA GRANITA, S.Pi)
NIP. 19760627 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maria Desyanti, S.E**
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

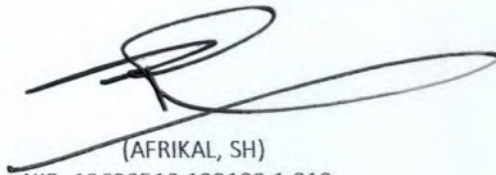
MARIA DESYANTI, SE
NIP. 19770317 200902 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
Bidang Pemberdayaan Nelayan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nelayan yang Mendapatkan Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak	Jumlah Nelayan Kecil yang Mendapatkan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	1500 Rekomendasi

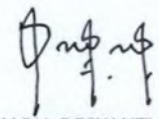
Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan



(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda



(MARIA DESYANTI, SE)
NIP. 19770317 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Yuliarsyam, SE**
Jabatan : **Pengelola Produksi Perikanan Tangkap**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

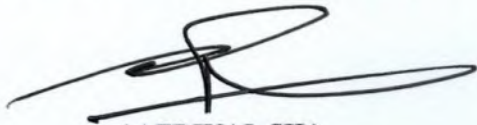
YULIAR SYAM, SE
NIP. 19730107 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Jabatan Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap
Bidang Pemberdayaan Nelayan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan dalam 1 Kabupaten	12 Dokumen
2.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala dan resiko	12 Dokumen

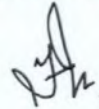
Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan



(AFRIKAL,SH)
NIP. 19690510 1991003 1 010

Pihak Pertama
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap



(YULIARSYAM,SE.)
NIP. 19730107 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ranti Satriani, S.Pi**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

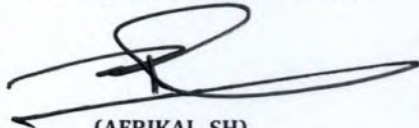
Pihak Pertama
**PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

RANTI SATRIANI, S.Pi
NIP. 19840127 200901 2 002

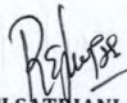
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan	Jumlah laporan kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan


(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 2026
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan


(RANTI SATRIANI, S.Pi)
NIP. 19840127 200901 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dewa Restu Rianto, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

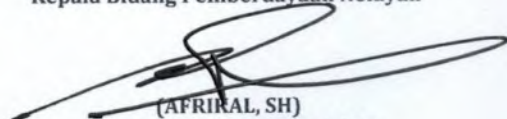
Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DEWA RESTU RIANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 19960514 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	27 Unit

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan


(AFRIRAH, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 14 Februari 2026
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan


(DEWA RESTU RIANTO, S.Pi., M.Si)
NIP. 19960514 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gusti Ayu Wulandari, S.Pi, M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
**PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi, M.Si
NIP. 19930822 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

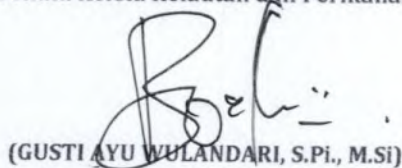
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dalam penerapan peningkatan kualitas mutu dan keamanan produk perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.	Jumlah laporan pembinaan penerapan standar mutu hasil perikanan	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan



(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 2026
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan



(GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si)
NIP. 19930822 201903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Harmon Zamora**

Jabatan : Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Februari 2026

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

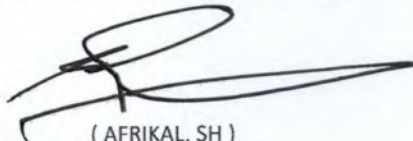
Pihak Pertama
PENATA SARANA DAN PRASARANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

HARMON ZAMORA
NIP. 19760704 200801 1 013

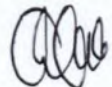
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Jabatan Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu terlaksananya Pelayanan Data Statistik Perikanan Tangkap Bidang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah laporan Statistik Perikanan Tangkap	12 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan,


(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1010

Painan Januari 2026
Pihak Pertama
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan


(HARMON ZAMORA)
NIP. 19760704 200801 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

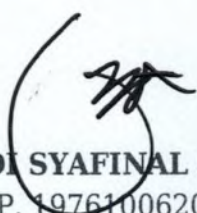
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

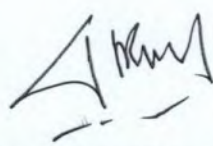
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003


HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

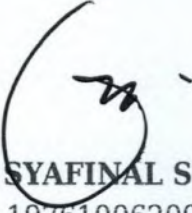
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	15725,70

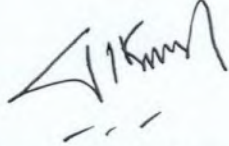
No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 439.990.979
Total Anggaran		Rp 439.990.979

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003


HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SUSILAWATI S.PI**

Jabatan : Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda / Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

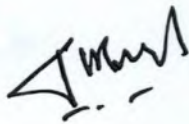
Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI
MUDA / MUDA

SUSILAWATI S.PI
NIP. 198107042006042008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

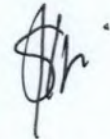
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya ikan yang meningkat pendapatannya	50
	- Telaksananya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI
MUDA / MUDA



SUSILAWATI S.PI
NIP. 198107042006042008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **DESRI LAKSMIDARTI S.PT**
Jabatan : Analis Akuakultur Ahli Muda / Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA / MUDA

HENRI SUSILOWATI S.PI, M.Si
NIP. 197209051999032003

DESRI LAKSMIDARTI S.Pt
NIP. 197312242008012006

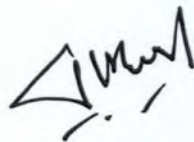
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/ dan iptek dan penguatan kelembagaan)	5
	- Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas	50

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

PIHAK PERTAMA,
ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA / MUDA



HENRI SUSILOWATI S.PI, M.Si
NIP. 197209051999032003

DESRI LAKSMIDARTI S.Pt
NIP. 197312242008012006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ADIKO ZUNANDI S.PI**
Jabatan : Analis Budidaya Perikanan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN

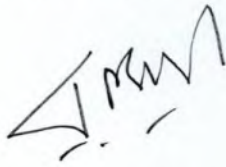
HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

ADIKO ZUNANDI S.PI
NIP. 198905222019031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
-	Pembenihan Ikan lele	12 kali	12 kali
-	Rekapitulasi Data Produksi BBI Pincuran Boga	1 Dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN

ADIKO ZUNANDI S.PI
NIP. 198905222019031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **LUKMAN**
Jabatan : Teknisi Perikanan Budidaya
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

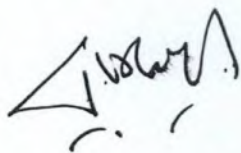
Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
TEKNISI PERIKANAN BUDIDAYA

LUKMAN
NIP. 196810172008011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan		
-	Pembenihan Ikan Nila	12 kali	12
-	Rekapitulasi Data Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	1 dokumen	1 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



HENRI SUSIOWATI S.PI, M.SI
NIP. 197209051999032003

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
TEKNISI PERIKANAN BUDIDAYA



LUKMAN
NIP. 196810172008011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **KASRIL SH**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Dan Pangan Dinas Perikanan Dan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003

Painan, 30 April 2026

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi	98,50%
		Persentase Konsumsi Protein	97%
2	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	25%
3	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	8,70%

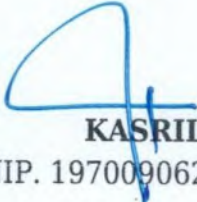
No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp86.000.060
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 29.000.200
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp Rp35.000.170
Total Anggaran		Rp150.000.430

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


ANDI SYAFINAL S. PI, M. SI
NIP. 197610062003121003


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ASPATUTI S.PT**

Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda / Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KASRIL SH**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan

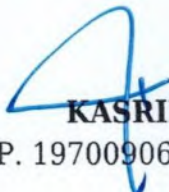
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
PANGAN DAN PERIKANAN / MUDA


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

Painan, 30 April 2026

PIHAK PERTAMA,


ASPATUTI S.PT
NIP. 197310012007012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	100
	- Optimalnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan: Umbi-umbian	1,569
		Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan: Protein Hewani	10,633
		Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan: Kacang-kacangan	2,246
		Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan: Kacang-kacangan	5,880
2	Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan	100
	- Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pangan Keluarga yang dilaksanakan	1

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA
PANGAN DAN PERIKANAN / MUDA


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001


ASPATUTI S.PT
NIP. 197310012007012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ROZA LINA ALDA S.K.M.**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KASRIL SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

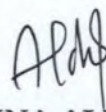
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

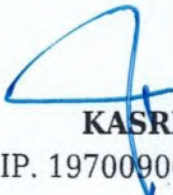

KASRIL SH
NIP. 197009062000121001


ROZA LINA ALDA S.K.M.
NIP. 197603252003122005

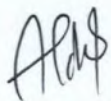
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100
	- Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	5

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


ROZA LINA ALDA S.K.M.
NIP. 197603252003122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RIRI LOVITA S.SIT**
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda / Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

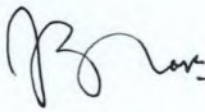
Nama : **KASRIL SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Painan, 30 April 2026 PIHAK PERTAMA, ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA / MUDA
--	--


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001


RIRI LOVITA S.SIT
NIP. 198001062003122002

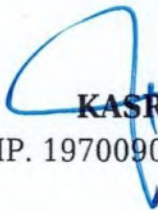
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

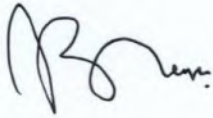
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Nagari yang keluar dari status rawan pangan	7
	- Terlaksananya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia	1

Painan, 30 April 2026

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN PANGAN DAN PERIKANAN

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA / MUDA


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001


RIRI LOVITA S.SIT
NIP. 198001062003122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RULI IKA FALDI S.IP**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KASRIL SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan
Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

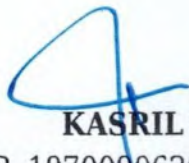

KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

RULI IKA FALDI S.IP
NIP. 198312012010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
-	Partisipasi mengikuti lomba B2SA tingkat provinsi	1 Kali	1 Kali
2	Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
-	Pelatihan keluarga dalam pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga	25 KK	25 KK

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

RULI IKA FALDI S.IP
NIP. 198312012010011019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **HOKI KURNIAWAN S.PI**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KASRIL SH**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan

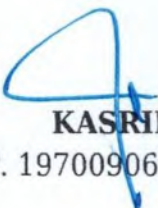
Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

HOKI KURNIAWAN S.PI
NIP. 199102132020121010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
-	Pelatihan gerakan sadar konsumsi pangan B2SA dalam rangka pencegahan stunting untuk dasawisma	50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga
2	Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
-	Fasilitasi bantuan bibit untuk pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga	25 KK	25 KK
3	Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan		
-	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan		
-	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	5 Dokumen	5 Dokumen

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

HOKI KURNIAWAN S.PI
NIP. 199102132020121010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MERLYN SYAHPUTRI**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KASRIL SH**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan

Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENGADMINISTRASI UMUM

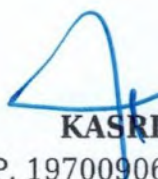

KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

MERLYN SYAHPUTRI
NIP. 198408032010012007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
-	Edukasi kegiatan B2SA Go To School	100 Siswa	100 Siswa

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
PENGADMINISTRASI UMUM

MERLYN SYAHPUTRI
NIP. 198408032010012007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **PINTO HAPRIALDY**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

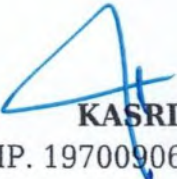
Nama : **KASRIL SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan Dan Perikanan
Selaku Atasan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Pengadministrasi Perkantoran

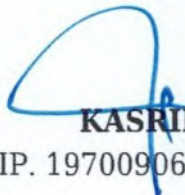

KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

PINTO HAPRIALDY
NIP. 198304292010011007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan		
-	Pemeriksaan di laboratorium sampel keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	13 Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	13 Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
-	Fasilitasi pemberian bantuan bibit untuk gerakan sadar konsumsi pangan B2SA dalam rangka pencegahan stunting	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG KONSUMSI, KEAMANAN
PANGAN DAN PERIKANAN


KASRIL SH
NIP. 197009062000121001

Painan, 30 April 2026
PIHAK PERTAMA,
Pengadministrasi Perkantoran

PINTO HAPRIALDY
NIP. 198304292010011007



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ā. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ō. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pncempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52



Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perikanan dan Pangan

RENCANA

STRATEGIS

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan dapat disusun sebagaimana mestinya.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renacana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun bertujuan sebagai landasan arah pembangunan selama lima tahun, dengan indikator kinerja yang dirumuskan secara terukur. Penetapan sasaran dan indikator di setiap perjenjangan kinerja, ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dalam ukuran waktu yang jelas.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan diharapkan dapat terlaksana secara optimal dengan Renstra ini sebagai pondasi. Harapan besar ditujukan agar dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Pangan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Painan, 3 September 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si

NIPR19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.....	32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	38
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	38
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.....	83
BAB V. PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis pada data dan kondisi faktual, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 7. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pengembangan sektor perikanan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik geografis strategis. Wilayah ini terletak di pesisir bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan panjang garis pantai mencapai 234 kilometer serta memiliki 47 pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir (BPS, 2025).

Kabupaten Pesisir Selatan dilalui 23 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung ekosistem perikanan dan ketahanan pangan daerah (BPS, 2025).

Potensi sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan. Berdasarkan Data Badan Pangan Nasional (Bapanas 2025), Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 86,71. Dinas Perikanan dan Pangan (2024) melaporkan bahwa nagari rawan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah satu nagari. Ketahanan dan Kerawanan pangan diukur berdasarkan aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Capaian ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah tahan pangan.

Sektor Perikanan merupakan sektor yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Produksi Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 60.943 ton dengan proporsi 76% pada kegiatan penangkapan dan 24% pada kegiatan budidaya. Aspek pemanfaatan dalam sektor perikanan tergambar dari jumlah konsumsi ikan masyarakat 47,53 kg/kapita/tahun (Dinas Perikanan dan Pangan 2024). Berdasarkan data tersebut sektor perikanan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam ketahanan pangan dan struktur perekonomian daerah. Hal ini dapat menjadikannya sektor strategis untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pembangunan pada sektor perikanan dan pangan berperan Dinas Perikanan dan Pangan sebagai Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan (OPD) yang membidangi urusan pangan dan perikanan. Peran ini mendukung terwujudnya visi daerah Kabupaten Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan. Perencanaan Strategis diperlukan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung pencapaian visi daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada prinsip perencanaan yang berbasis data dan bukti, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mengacu pada pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan sinergi lintas sektor. Permendagri 86 Tahun 2017 secara

tegas mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi unsur sistematis, partisipatif, terukur, dan berbasis kondisi faktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7.

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan disusun dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat terukur. Salah satu misi daerah yang dijadikan acuan adalah Sentra Pangan dan Menjadi Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Lebih Sejahtera sebagai refleksi dari kontribusi ketahanan pangan sektor tersebut terhadap daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan sebagai acuan pembangunan jangka menengah 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini, Dinas Perikanan dan Pangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berbasis pada keunggulan lokal, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan ata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan adalah untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan pangan di Kabupaten secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2025-2029;

2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang perikanan dan pangan tahun 2025-2029;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan renstra Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan disertai hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan 5 (lima) tahun terakhir diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan IKK. Penyajian pada bab ini memuat :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perikanan dan Pangan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perikanan dan Pangan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja

pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan sasaran pelayanan yang ditargetkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan

Penyusunan subbab ini ditentukan melalui Norma, Standa, dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangannya dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029. .

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkaah/upaya yang akan dilakukan. Arah kebijakan dalam renstra merupakan rangkaian kerja operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan serta arah kebijakan RPJMD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Subbab ini memuat daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perikanan dan Pangan selama periode renstra

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Anggaran

Subbab ini memuat penentuan target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dan Indikator yang disajikan

merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DNA ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perikanan dan pangan. Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan ke daerah.

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi satu Sub Bagian dan kelompok jabatan, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
3. Bidang Perikanan Budidaya yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
7. UPTD

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- g. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum, dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan asset yang jadi tanggung jawab dinas; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan dan tata usaha pegawai;
 - b. Penyiapan penatausahaan dan tata laksana;
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
 - e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan dinas;
 - f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang dan jasa;
 - g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak, maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang terdiri dari
- a. Kelompok Jabatan Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Kelompok Jabatan Keuangan

3. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
- e. Pelaksanaan analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan provinsi, maupun pusat;
- g. Penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
- i. Penilaian lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan lokasi sentra, perikanan budidaya yang terintegrasi;
- j. Pelaksanaan analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
- k. Pelaksanaan analisa usaha budidaya, perlindungan usaha

pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;

- l. Pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan;
- m. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kawasan dan kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat, dan produksi usaha budidaya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan penguatan kelembagaan, perlindungan nelayan dan memfasilitasi terbentuknya usaha nelayan kecil, kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
 - f. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
 - g. Penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;
 - h. Pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
 - i. Pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
 - j. Pelaksanaan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
 - k. Pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
 - l. Pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina usaha perikanan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, penyiapan pelaksanaan

- koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan

perundang-undangan

7. Jabatan Fungsional

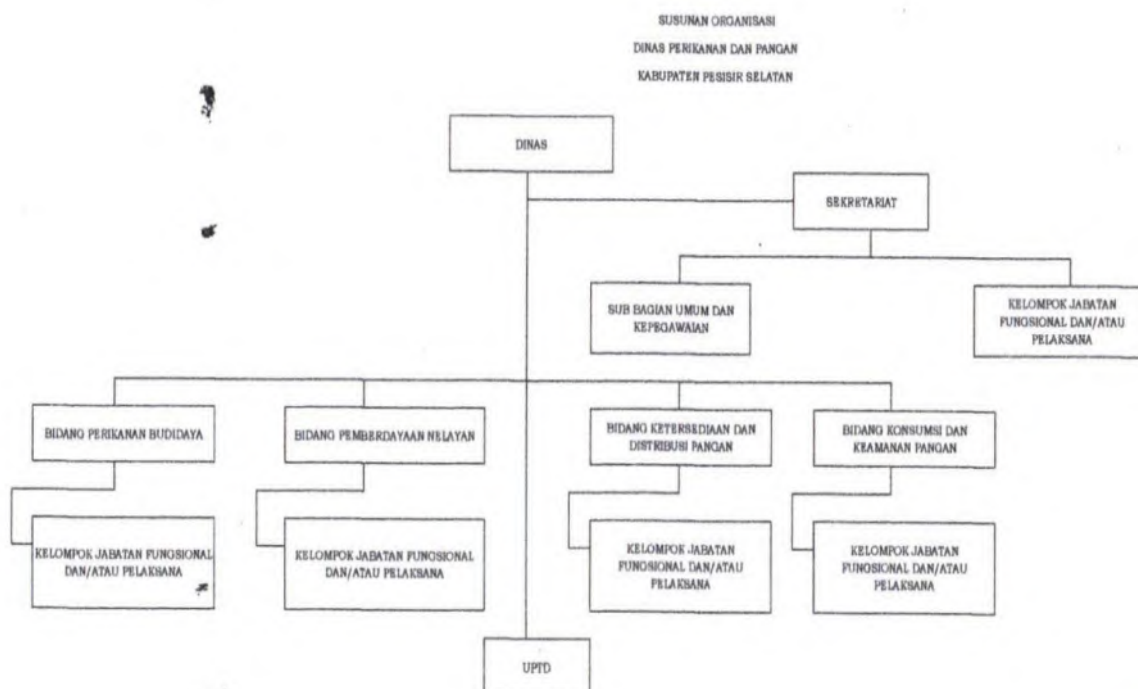
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan



PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESIR SELATAN
NO : 19 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA,
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan

a. Sumber Daya Manusia

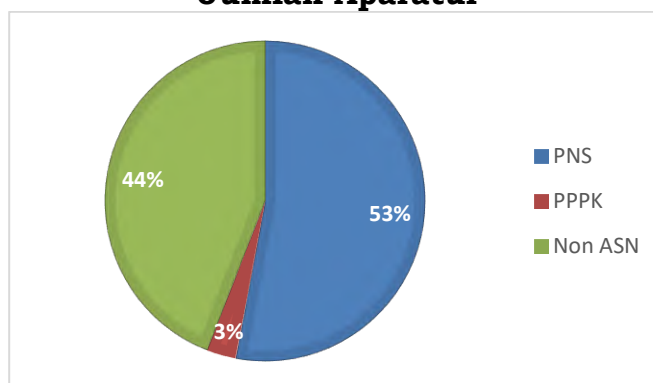
Berdasarkan kondisi per bulan September 2025, jumlah aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 68 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	36	53%
2	PPPK	2	3%
3	Non ASN	30	44%

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari PNS, PPPK dan non ASN dengan persentase 53 % PNS, 3% PPPK dan 44 % Non ASN.

Gambar 2.1
Jumlah Aparatur



Sumber Daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

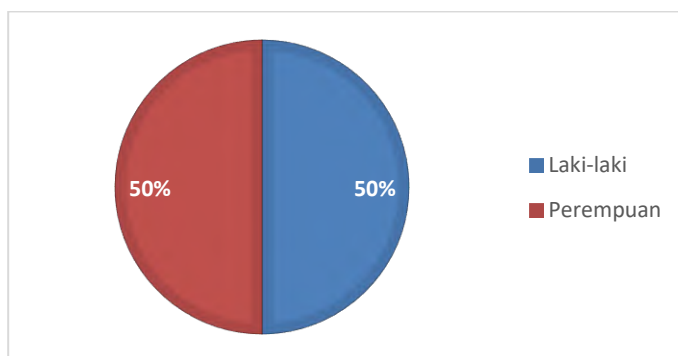
1) Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	19	50,00
2.	Perempuan	19	50,00
Jumlah		38	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

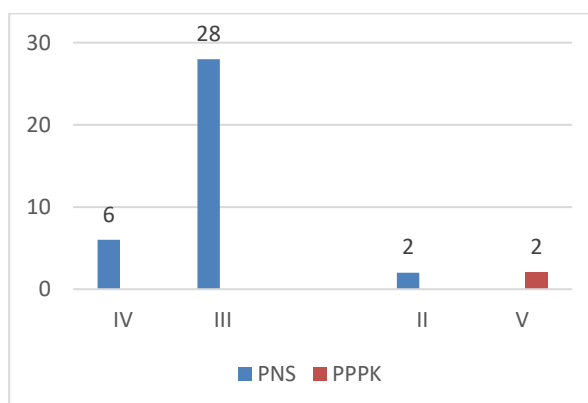
Dari 37 PNS Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Grade	PNS	PPPK
1.	IV	6	0
2.	III	28	0
3.	II	2	0
4.	V	0	2
Jumlah		36	2

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh PNS golongan IV sebanyak

6 orang atau 16,22 %, golongan III sebanyak 26 orang atau 70,27 % dan golongan II sebanyak 5 atau 13,51%. PPPK sebanyak 2 orang dengan grade V

3) Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

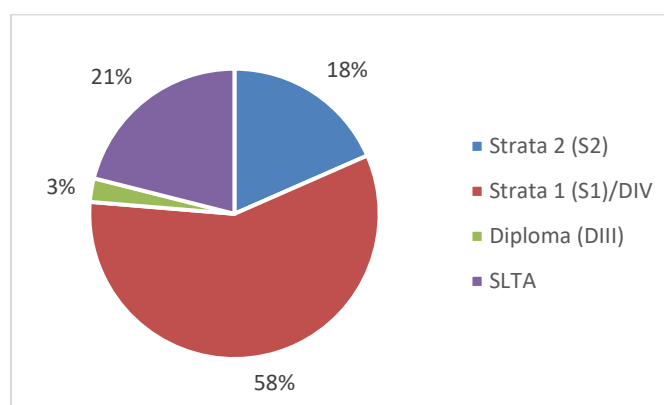
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	7	18,92
2.	Strata 1 (S1)/DIV	22	62,16
3.	Diploma (DIII)	1	2,70
4.	SLTA	8	16,22
Jumlah		37	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Grafik 2.4.
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



4) Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
5	Instalasi Lampu	2	
6	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
7	Instalasi Telepon	1	
8	Aset Lainnya	2	
9	Aset Tetap Lainnya	2	
10	Buku Pustaka	2	

Tabel 2.5.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

No	Uraian	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Total
1	Mobil	Unit	5	0	5
2	Motor	Unit	33	3	36
3	Kapal	Unit	1	0	1
4	Tanah	Sertifikat	5	0	5
5	Lemari	Buah	23	26	49
6	Kursi	Buah	141	43	184
7	Filling besi	Buah	13	8	21
8	Meja	Buah	19	58	77
9	AC	Unit	19	0	19
10	Laptop	Unit	30	6	36
11	Komputer PC	Unit	19	12	31
12	Printer	Unit	14	0	14
Total			322	156	478

Beberapa aset yang mengalami kerusakan dalam proses pengusulan panghapusan aset.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan merupakan gambaran menyeluruh dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra sebelumnya. Penilaian ini berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur pencapaian tujuan strategis, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi terhadap capaian indikator menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan. Hasil pengukuran evaluasi kinerja merupakan bentuk keberhasilan capaian dinas.

Perumusan kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi yang lebih objektif guna mencapai keberhasilan pelayanan publik. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan dan Pangan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Dinas Perikanan dan Pangan terbentuk dari penggabungan Dinas Perikanan dan Dinas Pangan pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengukuran pencapaian target kinerja awal diukur berdasarkan penetapan pembentukan dinas, yaitu selama periode 2021 – 2024. Pencapaian target dapat dijelaskan melalui tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A (80)	A(80,5)	A (81)	A (81,5)	A (80,86)	A (80,97)	A (81,46)	A (81,46)	1,01	1,01	0,99	
2	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	-	-	-	-	100	100	-	-	63	93	-	-	0,63	0,93
3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	80	81	82	84	80,4	86,9	88,9	88,2	1,01	1,07	1,08	1,05
4	Jumlah Produksi Perikanan	-	-	-	46.168	48.977	53.945	50.694	49.641	50.185	72.895	60.943	1,08	1,02	1,35	1,20

Berdasarkan tabel diatas terlihat rasio capaian kinerja diatas 90%. Capaian kinerja pada indikator inovasi daerah pada tahun pertama dan kedua tidak tercantum. Hal ini disebabkan setelah rasionalisasi RPJMD, Dinas Perikanan dan Pangan wajib mencantumkan inovasi daerah Rendahnya capaian tersebut. Analisa capaian kinerja dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Analisa Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Persentase Capaian Tahun ke-				Analisis	Solusi yang Dilakukan
		1	2	3	4		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	101%	101%	99%		belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	- Pengelolaan SDM - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja - Struktur Tata Kelola - Budaya dan Hubungan Organisasi
Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	-	-	63%	93%	Dengan adanya inovasi gemarikan semakin meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan penurunan angka stunting	Semakin ditingkatkannya kematangan inovasi untuk tahun berikutnya
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	101%	107%	108%	105%	Peningkatan skor PPH artinya peningkatan semakin beragamnya konsumsi pangan Masyarakat	gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA) yang akan

							meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	108%	102%	135%	120%	Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar	Pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan
						Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan alat tangkap ikan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 – 2024 dianalisa menggunakan anggaran dan realisasi. Penghitungan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi menggunakan metode *Compound Annual Growth Rate* (CAGR). CAGR digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan tahunan rata-rata dari suatu nilai selama periode tertentu, dengan asumsi bahwa pertumbuhan terjadi secara konsisten setiap tahun (tabel 2.8).

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Urusan Pangan	Rp 8.223.836.203	Rp 13.126.525.228	Rp 5.510.574.548	Rp 6.060.351.293	Rp 7.181.743.633	Rp 12.724.355.832	Rp 5.236.717.956	Rp 5.602.337.247	87%	97%	95%	92%	-7%	-6%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.285.513.243	Rp 5.202.293.878	Rp 5.045.574.953	Rp 5.437.042.978	Rp 6.303.174.718	Rp 4.943.685.212	Rp 4.836.771.089	Rp 5.049.607.393	87%	95%	96%	93%	-7%	-5%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 627.152.390	Rp 7.466.988.200	Rp -	Rp -	Rp 578.117.450	Rp 7.330.913.895	Rp -	Rp -	92%	98%	0%	0%	-100%	-100%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 266.026.740	Rp 187.189.750	Rp 170.000.019	Rp 560.793.415	Rp 257.922.675	Rp 182.479.200	Rp 159.498.512	Rp 498.994.504	97%	97%	94%	89%	20%	18%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 40.146.630	Rp 241.053.440	Rp 294.999.576	Rp 62.514.900	Rp 37.531.590	Rp 240.276.875	Rp 240.448.355	Rp 53.735.350	93%	100%	82%	86%	12%	9%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 4.997.200	Rp 28.999.960	Rp -	Rp -	Rp 4.997.200	Rp 27.000.650	Rp -	Rp -	100%	93%	0%	0%	-100%	-100%
Urusan Perikanan	Rp 4.076.491.912	Rp 7.967.858.746	Rp 9.624.440.505	Rp 5.012.293.831	Rp 3.993.652.363	Rp 7.750.855.741	Rp 8.721.549.109	Rp 4.835.641.068	98%	97%	91%	96%	5%	5%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 3.247.811.816	Rp 5.057.742.728	Rp 5.731.273.922	Rp 4.575.288.307	Rp 3.186.527.942	Rp 4.997.393.180	Rp 5.236.185.649	Rp 4.403.263.143	98%	99%	91%	96%	9%	8%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 723.502.120	Rp 1.734.957.860	Rp 1.728.272.760	Rp 374.115.974	Rp 706.029.645	Rp 1.713.535.401	Rp 1.559.543.420	Rp 369.651.825	98%	99%	90%	99%	-15%	-15%
Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Rp 105.177.976	Rp 1.175.158.158	Rp 2.164.893.823	Rp 62.889.550	Rp 101.094.776	Rp 1.039.927.160	Rp 1.925.820.040	Rp 62.726.100	96%	88%	89%	100%	-12%	-11%
T o t a l	Rp 12.300.328.115	Rp 21.094.383.974	Rp 15.135.015.053	Rp 11.072.645.124	Rp 11.175.395.996	Rp 20.475.211.573	Rp 13.958.267.065	Rp 10.437.978.315	91%	97%	92%	94%	-3%	-2%

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan negatif dari tahun awal perencanaan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar program tidak memiliki anggaran. Keterbatasan tersebut akibat dari efisiensi dari beberapa kegiatan yang diprioritaskan. Kabupaten Pesisir Selatan pada Periode 2021-2024 berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim sehingga hanya kegiatan yang prioritas yang mendapatkan pendanaan. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah Dana Alokasi Khusus di Bidang Perikanan dan Bidang Pangan tidak tersedia sejak tahun ke 3 dan ke 4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi wilayah yang besar memiliki tantangan dan peluang dalam pengembangan perikanan dan ketahanan pangan. Identifikasi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a) Kesadaran Pelestarian Sumber Daya Alam : Masih terdapat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan bahan kimia berbahaya dalam proses produksi perikanan.
- b) Produktivitas dan Daya Saing Rendah: Usaha perikanan didominasi oleh kapal kecil dengan pengolahan hasil yang masih tradisional.
- c) Integrasi Sistem Produksi: Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir menyebabkan lemahnya rantai pasok dan nilai tambah produk perikanan.
- d) Sarana dan Prasarana Terbatas: Keterbatasan fasilitas pengolahan, distribusi, dan belum tersedianya sistem jaminan mutu yang sesuai standar nasional dan ekspor.
- e) Distribusi Benih dan Indukan Unggul: Distribusi benih dan indukan unggul yang belum merata serta tingginya risiko serangan penyakit ikan, terutama pada sektor budidaya.
- f) Diversifikasi Pangan: Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi masyarakat.

- g) Konsumsi Non-Beras Rendah: Ketergantungan terhadap konsumsi beras yang masih tinggi, sementara konsumsi pangan lokal non-beras seperti umbi-umbian masih rendah.
- h) Daerah Rawan Pangan: Masih adanya daerah rawan pangan, terutama di wilayah terpencil, yang memerlukan perhatian dan intervensi program bantuan pangan.
- i) Keamanan Pangan: Ditemukannya bahan berbahaya dalam makanan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Perikanan dan Pangan lima tahun ke depan antara lain:

- a) Dukungan Kebijakan dan Program: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk kebijakan dan program percepatan pembangunan perikanan.
- b) Permintaan Pasar Meningkat: Permintaan pasar terhadap hasil perikanan terus meningkat, baik dari konsumen lokal, nasional, maupun internasional.
- c) Kemajuan Teknologi Perikanan : Kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi logistik perikanan dan inovasi dalam pengolahan hasil laut, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- d) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, yang berpotensi menjadi pemasok bagi daerah lain.
- e) Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi peluang pasar produk pangan, yang dapat mendorong perekonomian lokal.
- f) Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat mendukung percepatan kesadaran terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi.
- g) Perkembangan teknologi informasi, transportasi dan infrastruktur menjadi penunjang penting dalam memperkuat sistem pangan lokal.
- h) Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang melimpah memberikan potensi besar untuk produksi pangan berkelanjutan.

- i) Perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung program diversifikasi pangan berbasis lokal.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan mencerminkan kondisi aktual yang masih relevan untuk lima tahun ke depan. Namun, berbagai peluang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, terutama dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat peran teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perikanan yang berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan urusan pemerintahan, kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan dan Pangan meliputi sasaran layanan urusan pangan dan perikanan. Kelompok sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Urusan Pangan
 - Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - Rumah Tangga Rawan Pangan
 - Nagari Rawan Pangan
 - Balita *Stunting*
- Urusan Perikanan
 - Nelayan, individu atau tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Pembudidaya, individu atau tergabung ke dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
 - Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, individu atau tergabung ke dalam kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)

2.1.5 Mitra Dinas Perikanan dan Pangan

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Perikanan terbagi atas urusan perikanan dan urusan pangan. Optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam tercapainya tujuan. Mitra Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Badan Pangan Nasional
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

Dinas Perikanan dan Pangan selaku pelaksana teknis kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan PDRB, mewujudkan ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja. Upaya mewujudkan hal tersebut tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Bidang Perikanan

1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.
2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional
3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut
8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.

b. Bidang Pangan

1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.

2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.
3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal
5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan
6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, Dinas Perikanan dan Pangan perlu merumuskan isu strategis dengan memperhatikan isu lingkungan dinamis global, nasional dan regional. Perumusan ini mencakup hasil telaahan atas laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2024, serta dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Provinsi Sumatera Barat di bidang pangan dan perikanan (lampiran 1). Berdasarkan analisa dan telaahan tersebut dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.
4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman(B2SA).
5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.

7. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal.
8. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.
9. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
10. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
11. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Dinas Perikanan dan Pangan. Dinas Perikanan dan pangan memiliki yang menggambarkan arah pembangunan pada bidang pemerintahan kelautan dan perikanan serta bidang pangan. Tujuan dijabarkan secara spesifik pada sasaran Dinas Perikanan dan Pangan yang disertai oleh indikator yang terukur. Perumusan ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi sektoral dan isu-isu strategis yang berkembang. Rincian tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN											
- Meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86,71	87,47	88,23	91,98	93,47	95,15	96,35	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0	1,76	1,86	2	2,21	2,87	2,96	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	92,96	93,71	94,46	95,22	95,98	96,75	97,53	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,49	81,6	81,75	81,94	82,18	82,47	83	
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	93	80	81	82	83	84	85	
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkelanjutan dan Strategis		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	68.213,86	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan yang berfokus pada ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Perumusan strategi dalam Renstra ini didasarkan pada prinsip perencanaan berbasis data, sistematis,

dan terukur, yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan strategi ini merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa strategi disusun berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal. Selain itu, strategi juga dirancang dengan memperhatikan kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan perikanan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar.

Strategi yang telah disusun menjadi pedoman dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih operasional melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap strategi diarahkan untuk memastikan pelaksanaan intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan di bidang ketahanan pangan dan perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I 2025	Tahap II 2026	Tahap III 2027	Tahap IV 2028	Tahap V 2029
Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat pondasi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan pangan, stabilisasi harga, perbaikan infrastruktur dan pola konsumsi pangan masyarakat
Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan	Meningkatkan produksi perikanan melalui penguatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana perikanan

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rumusan teknis dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan sektor perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down-bottom-up*, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan arah kebijakan mempertimbangkan tantangan, isu strategis, serta potensi dan peluang yang telah teridentifikasi dari kondisi internal maupun eksternal.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2025				
No	Operasionalisas i NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan	Ket
1.	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona	1. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).	
2.	Peningkatan Produksi Budi Daya Berkelanjutan		2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	
			3.Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.	
			4. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.	
			5. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.	
			6. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.	
			7. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.	
			8. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.	
3.	Penguatan diversifikasi dan konsumsi pangan	1. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	1. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.	
		2. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan	
		3. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).	1. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.	
			2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).	
4.	Penguatan penanganan Kerawanan Pangan	4. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.	
5	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan	1. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.	

Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan ini ditujukan agar pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dapat berjalan terarah, dan konsisten dengan prioritas pembangunan daerah. Rincian strategi dan arah kebijakan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan				
Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra pangan unggulan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor PPH	Peningkatan ketersediaan pangan dan Penguatan Distribusi Pangan	1. Mendukung penjaminan ketersediaan pangan masyarakat dan kemudahan akses terhadap pangan
				2. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.
				3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.
				4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.
				5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).	1. Kampanye edukatif konsumsi pangan B2SA melalui sekolah, Posyandu, dan komunitas Perempuan
				2. Promosi konsumsi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah).
				1. Penyediaan dan peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana produksi perikanan (alat tangkap, kolam budidaya, kapal, pakan, benih unggul).
				2. Pengembangan sistem teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
				3. Peningkatan kapasitas pembudidaya dan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan teknis berbasis kawasan.

			Penguatan daya saing hasil perikanan melalui peningkatan mutu, pengolahan, dan pemasaran	1. Fasilitasi sertifikasi mutu dan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan.
				2. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis kelembagaan di sentra produksi.
				3. Dukungan promosi, kemitraan usaha, dan digitalisasi pemasaran produk perikanan.
			Penguatan kelembagaan, SDM, dan tata kelola pembangunan perikanan.	1. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.
				2. Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitator perikanan melalui pelatihan teknis dan manajerial.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN							
Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produksi perikanan untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)		
					Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)		
		Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
					Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

pangan unggulan				Jumlah Inovasi (Inovasi)	2.09.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	2.09.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
			Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

				Kemandirian Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Persentase Konsumsi Energi (%)	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan MASYARAKAT	
					Persentase Konsumsi Protein (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

				Cadangan Pangan Daerah	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Optimalnya Penanganan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan	

				Kerawanan Pangan		Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			
				Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan		
				Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)			
				Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
						Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

				3.25.05 - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
		Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
	Meningkatnya Produksi	Optimalnya Pemberdayaan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

			Perikanan Budidaya	Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Optimalnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	

				Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K ET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.233.086 .900		8.228.500 .000		9.009.000. 000		9.860.50 0.000		10.802.00 0.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.980.000 .000		6.578.000 .000		7.236.000. 000		7.960.00 0.000		8.756.000 .000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1	1	5.980.000 .000	1	6.578.000 .000	1	7.236.000. 000	1	7.960.00 0.000	1	8.756.000 .000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0	0,18		0,23		0,29		0,35		0,64			
	Persentase Kinerja Bidang/ Sekretari at yang dicapai (%)	100	100		100		100		100		100			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.0 00		174.000.0 00		181.000.0 00		200.000. 000		250.000.0 00		
Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	1	165.000.0 00	1	174.000.0 00	1	181.000.0 00	1	200.000. 000	1	250.000.0 00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen	1	5		5		5		5		5			

	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3		3		3		3		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5	60.000.000	5	63.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	3	15.000.000	3	16.000.000	3	17.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		63.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	6	60.000.000	6	63.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	100.000.000		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.451.000.000		4.594.000.000		4.817.000.000		5.300.000.000		5.960.000.000		
Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.451.000.000	36	4.594.000.000	36	4.817.000.000	40	5.300.000.000	50	5.960.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.200.000.000		4.340.000.000		4.550.000.000		5.000.000.000		5.650.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	36	4.200.000.000	36	4.340.000.000	36	4.550.000.000	40	5.000.000.000	50	5.650.000.000		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				210.000.000		210.000.000		220.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1	210.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		16.000.000		17.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		

2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	12	13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				69.000.000		73.000.000		75.000.000		82.000.000		82.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	69.000.000	1	73.000.000	1	75.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		26.000.000		27.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.09.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	4	10.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		

	pada SKPD (Laporan)													
2.09.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.000.00 0		36.000.00 0		37.000.00 0		40.000.0 00		40.000.00 0		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	34.000.00 0	1	36.000.00 0	1	37.000.00 0	1	40.000.0 00	1	40.000.00 0		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.00 0		55.000.00 0		70.000.00 0		75.000.0 00		75.000.00 0		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.00 0	5	55.000.00 0	5	70.000.00 0	5	75.000.0 00	5	75.000.00 0		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.00 0		55.000.00 0		70.000.00 0		75.000.0 00		75.000.00 0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	50.000.00 0	5	55.000.00 0	5	70.000.00 0	5	75.000.0 00	5	75.000.00 0		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.000.0 00		427.000.0 00		464.000.0 00		495.000. 000		574.000.0 00		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	358.000.0 00	1	427.000.0 00	1	464.000.0 00	1	495.000. 000	1	574.000.0 00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	24.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.500.000		30.000.000		31.000.000		35.000.000		40.000.000		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	28.500.000	12	30.000.000	12	31.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		36.000.000		36.500.000		37.500.000		38.500.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	35.000.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	37.500.000	1	38.500.000		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000		240.000.000		480.000.000		530.000.000		350.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	180.000.000	70	240.000.000	70	480.000.000	35	530.000.000	35	350.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8		8		9		22		10			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.000.000		200.000.000		280.000.000		250.000.000		200.000.000		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	63	140.000.000	70	200.000.000	70	280.000.000	35	250.000.000	35	200.000.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		200.000.000		280.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8	40.000.000	8	40.000.000	9	200.000.000	22	280.000.000	10	150.000.000		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000		408.000.000		431.000.000		460.000.000		495.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	395.000.000	1	408.000.000	1	431.000.000	1	460.000.000	1	495.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.000.000		98.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	95.000.000	1	98.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000		
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		160.000.000		161.000.000		170.000.000		175.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	150.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		170.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	170.000.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.000.000		607.000.000		718.000.000		818.000.000		970.000.000		
Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	312.000.000	1	607.000.000	1	718.000.000	1	818.000.000	1	970.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39		39		39		39		39			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		25		25			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66		66		66		66		66			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				58.000.000		61.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1	1	58.000.000	1	61.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		175.000.000		261.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39	150.000.000	39	175.000.000	39	261.000.000	39	300.000.000	39	350.000.000		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				16.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	16.000.000	20	16.000.000	20	17.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	66	23.000.000	66	25.000.000	66	25.000.000	66	30.000.000	66	30.000.000		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	40.000.000	5	180.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000		

2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif (%)	85	100	515.000.000	100	550.500.000	100	591.000.000	100	636.500.000	100	692.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	14,15	40		60		80		100		100			
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				515.000.000		550.500.000		591.000.000		636.500.000		692.000.000		
Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	515.000.000	2	550.500.000	2	591.000.000	2	636.500.000	2	692.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				500.000.000		535.000.000		575.000.000		620.000.000		675.000.000		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	2	500.000.000	2	535.000.000	2	575.000.000	2	620.000.000	2	675.000.000		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		17.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	0	4	15.000.000	4	15.500.000	4	16.000.000	4	16.500.000	4	17.000.000		

	Infrastruktur Logistik (Laporan)													
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				567.099.700		909.000.000		975.000.000		1.042.000.000		1.096.000.000		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Protein (%)	91	97	567.099.700	98	909.000.000	99	975.000.000	100	1.042.000.000	100	1.096.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)	2.460	2.600		2.650		2.650		2.700		2.700			
	Persentase Konsumsi Energi (%)	93	98,5		98,8		99		99,2		99,2			
	Angka Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/Hari)	68	72		73		75		75		75			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				330.042.400		405.000.000		430.000.000		485.000.000		510.000.000		
Optimalnya Pemenuhan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	330.042.400	12	405.000.000	12	430.000.000	12	485.000.000	12	510.000.000		
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40		60		80		100		120			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1	30.000.00 0	1	33.000.00 0	1	34.000.00 0	1	35.000.0 00	1	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan				50.000.00 0		70.000.00 0		90.000.00 0		110.000. 000		130.000.0 00		

Ketahanan Pangan Keluarga														
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40	50.000.000	60	70.000.000	80	90.000.000	100	110.000.000	120	130.000.000		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				80.042.400		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	0	12	80.042.400	12	120.000.000	12	120.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	30.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	36.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		

Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				30.000.00 0		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.0 00		36.000.00 0		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	12	30.000.00 0	12	33.000.00 0	12	34.000.00 0	12	35.000.0 00	12	36.000.00 0		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				167.057.3 00		389.000.0 00		400.000.0 00		412.000. 000		436.000.0 00		
Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	167.057.3 00	21	389.000.0 00	21	400.000.0 00	21	412.000. 000	21	436.000.0 00		
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10		21		21		21		21			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				142.056.9 00		330.000.0 00		340.000.0 00		350.000. 000		370.000.0 00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	10	142.056.9 00	21	330.000.0 00	21	340.000.0 00	21	350.000. 000	21	370.000.0 00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				25.000.40 0		59.000.00 0		60.000.00 0		62.000.0 00		66.000.00 0		
Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	10	10	25.000.40 0	21	59.000.00 0	21	60.000.00 0	21	62.000.0 00	21	66.000.00 0		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				70.000.00 0		115.000.0 00		145.000.0 00		145.000. 000		150.000.0 00		

Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	70.000.000	1	115.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				50.000.000		90.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	50.000.000	1	90.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				140.987.200		158.000.000		173.000.000		187.000.000		222.000.000		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	25	140.987.200	20	158.000.000	15	173.000.000	10	187.000.000	5	222.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		

Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				30.987.200		45.000.000		49.000.000		52.000.000		56.000.000		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	30.987.200	1	45.000.000	1	49.000.000	1	52.000.000	1	56.000.000		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				110.000.000		113.000.000		124.000.000		135.000.000		166.000.000		
Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	110.000.000	1	113.000.000	1	124.000.000	1	135.000.000	1	166.000.000		
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				80.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000		

2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	3,7	8,7	30.000.000	11,2	33.000.000	13,7	34.000.000	16,3	35.000.000	16,3	36.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	5	30.000.000	7	33.000.000	9	34.000.000	11	35.000.000	13	36.000.000		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.110.000.000		4.058.000.000		4.376.300.000		4.652.930.000		5.102.300.000		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.445.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		2.870.000.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	42.628,31	47.263,5	2.445.000.000	48.016,82	2.720.000.000	48.782,15	2.770.000.000	49.559,68	2.820.000.000	50.760,45	2.870.000.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.395.000.000		2.670.000.000		2.720.000.000		2.770.000.000		2.820.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	2.395.000.000	5	2.670.000.000	5	2.720.000.000	5	2.770.000.000	5	2.820.000.000		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	100		105		110		115		120			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20		20		20		20		20			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				2.275.000.000		2.550.000.000		2.600.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		

Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	152	130	2.275.000.000	135	2.550.000.000	140	2.600.000.000	145	2.650.000.000	150	2.700.000.000		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	20	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	30	300.000.000,00	30	310.000.000,00	30	320.000.000,00	30	330.000.000,00	30	340.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				415.000.000		1.083.000.000		1.351.300.000		1.572.930.000		1.972.300.000		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	14.183,66	15.725,7	415.000.000	15.977,31	1.083.000.000	16.232,95	1.351.300.000	16.492,68	1.572.930.000	16.893,75	1.972.300.000	3.25.2.09.0.00.0 1.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				115.000.000		750.000.000		1.005.000.000		1.215.500.000		1.581.550.000		

Optimalnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	115.000.000	6	750.000.000	6	1.005.000.000	6	1.215.500.000	6	1.581.550.000		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2		9		12		15		18			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1		5		5		5		5			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		670.000.000		920.000.000		1.120.000.000		1.480.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0	2	50.000.000	9	670.000.000	12	920.000.000	15	1.120.000.000	18	1.480.000.000		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	0	1	50.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.500.000	5	66.550.000		

3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	1	15.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				300.000.000		333.000.000		346.300.000		357.430.000		390.750.000		
Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	300.000.000	30	333.000.000	30	346.300.000	35	357.430.000	35	390.750.000		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi				30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		44.200.000		

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	30.000.000	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	44.200.000		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		230.000.000		230.000.000		250.000.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		50.000.000		25.000.000		27.000.000		30.000.000		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	30	50.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000	35	60.500.000	35	66.550.000		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		

Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				40.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	5	40.000.000	6	45.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	0	324,99	210.000.000	488,24	210.000.000	756,77	210.000.000	1.172,99	210.000.000	1.559,66	210.000.000	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,77	35,69		35,73		35,78		35,83		35,83			
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		

Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Skala Usaha dan Risiko														
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	30	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000		

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
			2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
6.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7.	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana table berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN DAN PANGAN									
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	81,49	81,60	81,75	81,94	82,18	82,47	83	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,1	88,5	88,7	88,9	89,2	89,5	89,7	
4.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	60.942,68	62.000	63.304,20	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	
5.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	93	80	81	82	83	84	85	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan dan Pangan

INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

Persentase Jumlah Cadangan Pangan	komulatif	Persentase	14,15	20	40	60	80	100	100	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Positif	Ton	60.942,68	62.000	63.304,2	64.482,37	65.711,87	67.225,34	69.213,86	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan , disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan

LAMPIRAN

1. Perumusan Isu Strategis Dinas Perikanan dan Pangan

No	Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global *	Nasional **	Regional ***	
1.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penghasil pangan pokok terbesar di Sumatera Barat	1. Belum terpenuhinya komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang telah disepakati sebesar 100 ton.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Terdapat <i>hidden cost</i> dari aspek lingkungan, sosial dan kesehatan akibat pola konsumsi pangan tidak sehat	1. Akses Pangan yang tidak merata	1. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan	1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribusi.
		2. Stabilisasi harga dan pasokan pangan belum dapat terkendali sepenuhnya.		2. Ketimpangan beban dan manfaat yang ditanggung berupa masalah distribusi, keamanan pangan dan gizi yang diterima konsumen	2. Sebaran Wilayah Produksi di daerah tertentu menyebabkan distribusi searah	2. Masih belum terpenuhinya pemenuhan cadangan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan proporsi yang ditetapkan	2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
		3. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).		3. Minimnya Integrasi Biaya Sosial-Lingkungan dalam Kebijakan Publik dan Harga Pangan	3. Rantai Distribusi yang panjang menyebabkan disparitas harga	3. Masih ditemuinya daerah rawan pangan	3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.

		4. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan local			4. Peningkatan Jumlah Penduduk	4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
		5. Kurangnya kesadaran produsen PSAT terhadap keamanan dan mutu pangan			5. Belum Idealnya Pola Pangan harapan Masyarakat	5. Peran kelembagaan pangan dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan belum maksimal	5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
		6. Belum terbentuknya Kelembagaan yang menjamin keamanan pangan			6. Keamanan Pangan	6. Pengembangan pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal belum optimal	6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.
2.	Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan perikanan	1. Wilayah perikanan budidaya dan pengembangan budidaya belum optimal.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Ketimpangan perkembangan akuakultur antarwilayah	1. Peningkatan Jumlah Penduduk	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan	1. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal
		2. Produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional		2. Penurunan stok ikan	2. Degradasi Laut dan Polusi	2. Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap melalui alokasi yang profesional antara stok sumberdaya ikan, kemampuan sumberdaya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan	2. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.

3. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya		3. Keterbatasan Perlindungan Nelayan Kecil	3. IUU dan Overfishing	3. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan	3. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
4. Masih rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		4. Ancaman perubahan iklim & polusi laut	4. Perubahan Iklim	4. Peningkatan inovasi teknologi pembenihan dan induk unggul komoditas strategis	4. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya air tawar		5. Potensi limbah yang belum dioptimalkan		6. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya	5. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.
6. Tingginya modal perbekalan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan				7. Diversifikasi konsumsi produk olahan ikan	
7. Belum optimalnya produksi hasil pembesaran budidaya tawar/laut				8. Penyediaan penyaluran bantuan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang terkena dampak perubahan iklim/ bencana	

		8. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				9. Pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan, serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan	
		9. Keterbatasan anggaran daerah dalam cakupan bina kelompok dan pelaku usaha perikanan seperti penyediaan sarana prasarana dan penjaminan mutu perikanan.				10. Masih rendahnya daya saing produk hasil perikanan	

*FAO. 2024. The State of Food and Agriculture 2024 – Value-driven transformation of agrifood systems.

FAO. 2024. The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 – Blue Transformation in action.

** Rancangan Awal Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024

***Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
1.	Meningkatkannya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP	Tanpa Satuan	Hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada level Perangkat Daerah (PD) oleh Inspektorat Daerah	$\sum_{i=1}^n (B_i \times N_i)$ B_i = Bobot komponen ke-i N_i = Nilai capaian komponen ke-i (skala 0-100) n = Jumlah komponen yang dinilai
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	Nilai Kematangan dari inovasi yang dilakukan	Nilai kematangan inovasi berdasarkan aplikasi IGA
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang berkualitas dan terjangkau	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Tanpa Satuan	Susunan konsumsi pangan yang terdiri dari berbagai kelompok pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, budaya lokal, serta potensi sumber daya daerah, untuk mewujudkan gizi seimbang dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.	Akumulasi capaian konsumsi pangan
3.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	ton	Jumlah hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan perikanan dalam kurun waktu tertentu yang dihitung dalam satuan berat (ton)	Akumulasi produksi perikanan
NO	SASARAN TAKTIKAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	Peningkatan nilai AKIP per Tahun	$\frac{\text{Nilai tahun } n+1 - \text{Nilai tahun } n}{\text{Nilai tahun } n} \times 100\%$
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	%	Persentase kinerja bidang tercapai dalam fisik dan keuangan	Hasil pengukuran aplikasi simbangda
		Jumlah Inovasi	Tanpa Satuan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan	Jumlah inovasi yang dilaksanakan
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	%	Meningkatkan Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertangani)*100%
2.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	Kg/Kapita/Tahun	ukuran jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu dalam suatu daerah	Ketersediaan Protein Pangan / (jumlah penduduk*365)*100%
		Angka Ketersediaan Protein	gr/kapita/tahun	persentase jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita penduduk dalam bentuk protein	Ketersediaan Pangan Pokok yg dikonsumsi/ (jumlah penduduk*365)*100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang aktif	%	Persentase Gapoktan LPM yang aktif	(Jumlah LPM/Jumlah LPM yg aktif)*100%
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
4.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%		
5.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi Persentase Konsumsi Protein	% %		
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
6.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton		
7.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan Angka Konsumsi Ikan	ton Kg/Kapita/Tahun		
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton		
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR	SATUAN	Konsep/Definisi	Rumus
SEKRETARIAT					
1	Optimalnya Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase dokumen publik dan dipublish Jumlah Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	% Dokumen		
	Optimalnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen		
	Optimalnya Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan	Dokumen		
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN					
2	Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan yang ditangani Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang tersedia	Rumah Tangga Dokumen	Meningkatnya pengelolaan penanganan Nagari Rawan Pangan Dokumen Analisa Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	(Jumlah Daerah Rawan Pangan/Jumlah Daerah yang tertangani)*100% Jumlah dokumen FSVA yang tersedia
3	Optimalnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan	ton	Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.	Cadangan Pangan Masyarakat + Cadangan Pangan Pemerintah

5.	Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	- Jumlah Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan - Jumlah gerakan pangan murah yang dilaksanakan	Lembaga Lumbung Pangan Dokumen	Lumbung Pangan Masyarakat yang melaksanakan peningkatan kapasitas upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama di daerah yang rawan pangan	Jumlah LPM yang melaksanakan peningkatan kapasitas Jumlah Pelaksanaan Kegiatan GPM
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN					
6.	Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	- Jumlah Usaha yang mendapatkan rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian	Jumlah rekomendasi
7.	Optimalnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan	%	Keragaman konsumsi pangan perkelompok pangan merujuk pada variasi dan perbedaan dalam konsumsi pangan antara kelompok pangan berbeda	
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN					
8.	Optimalnya Pengelolaan Nelayan Kecil	- Jumlah SOP dan Layanan tempat pendauran ikan - Jumlah data dan informasi Perikanan Tangkap	ton Dokumen		
9.	Optimalnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	- Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya - Jumlah Kelompok nelayan yang memperoleh fasilitas pembentukan kelembagaan dan kemitraan usaha	Orang Kelompok		
10.	Optimalnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah Pengujian Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha mikro dan kecil - Jumlah Rekomendasi SKP Produk Unit Usaha/Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang tersedia	Rekomendasi Dokumen Unit		
11.	Optimalnya Pemberdayaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang memperoleh pembinaan dan pelatihan teknis - Jumlah Pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan ikan - Jumlah promosi hasil perikanan dalam rangka pencapaian Angka Konsumsi Ikan	Unit Usaha Pelaku Usaha Kegiatan		
BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN					
12.	Optimalnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Pembudidayaan ikan yang meningkat pendapatannya - Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya - Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi - Jumlah Pengujian Kualitas Air pada Kelompok Budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Orang ha ekor Dokumen	Paket bantuan yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan pembudidayaan ikan Pertambahan Luas Lahan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan Produksi benih budidaya air tawar dan air payau yang dihasilkan Pengambilan sampel air pada kelompok untuk diuji kualitas airnya	Jumlah pembudidayaan yang meningkat pendapatannya Jumlah pertambahan luas lahan Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi BBI dan UPR Jumlah dokumen Pengujian Kualitas Air
13.	Optimalnya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses & informasi/dan iptek dan penguatan kelembagaannya)	Orang	Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan	Jumlah Anggota Pokdakan dan Anggota UPR yang mengikuti pelatihan, penyuluhan dan pendampingan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Mohammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
25651

Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 09 September 2026

Nomor : 800/23/DPP/2026

Lamp : -

Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth,

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. PPPK Penuh Waktu
3. PPPK Paruh Waktu
4. Tenaga Outshourcing

di

tempat

Dalam rangka Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja bagi karyawan/i pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka bersama ini di undang saudara/i untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 10 September 2026

Pukul : 08.30 s/d selesai

Tempat : Aula Dinas Perikanan dan Pangan

Acara : Rapat Evaluasi Kerja

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadiran di ucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19761006 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M. HATTA - PAINAN

NOTULEN RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 10 September 2026
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Pukul : 08.30 WIB - Selesai
Pimpinan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan
Materi : Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026.
Hasil :

Dalam rapat evaluasi Triwulan III tahun 2026 ada beberapa agenda yang dibahas yaitu :

1. Evaluasi kinerja ASN;
 - a. Masing-masing bidang diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. Evaluasi meliputi kedisiplinan, pelaksanaan tugas, pencapaian target pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, tanggung jawab, serta koordinasi antarpegawai.
 - c. Setiap ASN agar meningkatkan kedisiplinan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kualitas pelaksanaan tugas.
 - d. Pejabat atasan langsung agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pegawai.
 - e. Setiap pegawai diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.
 - f. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar segera disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut.
2. Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dan Rencana Aksi Triwulan III tahun 2026;
 - a. Masing-masing bidang agar melakukan pemutakhiran data realisasi kinerja sampai dengan periode pelaporan terbaru.

- b. Indikator yang capaian kinerjanya masih rendah agar menjadi perhatian dan dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian target harus diidentifikasi sebagai bahan evaluasi.
 - d. Setiap bidang diminta menyusun langkah tindak lanjut untuk meningkatkan capaian indikator sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
 - e. Data capaian kinerja harus sinkron antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi, dan dokumen pertanggungjawaban.
- 3. Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2026;
 - a. Masing-masing bidang agar menyiapkan data realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan **Triwulan III Tahun 2026**.
 - b. Evaluasi meliputi capaian fisik, realisasi keuangan, capaian indikator kinerja, serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. Perbandingan antara target dan realisasi harus disajikan secara jelas untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing program dan kegiatan.
 - d. Kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah agar segera dilakukan percepatan sesuai ketentuan.
 - e. Setiap bidang agar menyampaikan faktor penyebab rendahnya realisasi serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan sampai dengan akhir tahun.
 - f. Data RKPD Triwulan III harus disinkronkan dengan data pada masing-masing bidang dan bagian terkait sebelum disampaikan sebagai laporan resmi perangkat daerah.
- 4. Penyusunan bahan paparan e-SAKIP;
 - a. Disepakati bahwa bahan paparan **e-SAKIP** harus menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja perangkat daerah.
 - b. Bahan paparan agar memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, capaian kinerja, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala pencapaian.

- c. Data yang digunakan harus merupakan data terbaru dan konsisten dengan dokumen perencanaan serta laporan kinerja perangkat daerah.
- d. Masing-masing bidang bertanggung jawab menyediakan data dan bukti dukung sesuai indikator yang menjadi kewenangannya.
- e. Narasi capaian kinerja harus menampilkan faktor pendukung, faktor penghambat, efisiensi penggunaan sumber daya, serta Rencana Aksi/tindak lanjut.
- b. Bahan paparan akan dilakukan penyempurnaan dan verifikasi sebelum digunakan dalam penyampaian/evaluasi e-SAKIP.

NOTULEN,



RENI SUSANTI, S.PI.,M.SI

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
EVALUASI KINERJA TRIWULAN III
KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026
RUANG RAPAT DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Harima Tgl. 2/3/2026

Signature

Apri Junaidi, S.E., M.H.

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19670712 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 di sektor Perikanan dan Pangan.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Perikanan dan Pangan baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas tahun anggaran 2025.

Demikian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi sumber informasi masyarakat pada umumnya, terima kasih.

Pairan, 10 Februari 2026
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

ANDI SYAFINAL, S.Pi. M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan tujuan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kedudukan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKJIP).

Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan Dinas Perikanan dan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan

dan pembangunan di bidang Perikanan dan Pangan serta sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan serta peningkatan hasil dan manfaat dibanding dengan tahun sebelumnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan bidang perikanan dan urusan bidang pangan adalah untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan daerah maka dasar hukum keberadaan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28

Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir selatan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksanana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

1.3.3 Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan perikanan dan usaha

- kecil pembudidayaan ikan, penerbitan perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan
4. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, pengelolaan neraca pangan wilayah, cadangan pangan daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, serta penyediaan prasarana dan sarana pangan
 5. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan lingkup tugasnya
 6. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik Daerah di bidang pangan;
 7. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 8. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
 9. pengembangan sistem informasi pangan dan gizi
 10. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan barang milik Daerah dan dokumentasi; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
2. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
3. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
4. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah lingkungan Dinas;
6. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
7. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
8. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
2. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan, dan produksi usaha budidaya;
5. Pelaksanaan Analisa kebutuhan pengembangan kegiatan/ pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
6. Penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan Masyarakat pembudidaya di bidang perikanan budidaya baik bantuan propinsi maupun pusat;
7. Penyiapan bahan rancangan teknis dan bahan pedoman/ panduan teknis di bidang perikanan budidaya;
8. Pelaksanaan Analisa dokumen dampak lingkungan terkait perikanan budidaya;
9. Penilaian Lokasi budidaya sesuai dengan masterplan/rencana program investasi jangka menengah dan melakukan pemantauan Lokasi sentra perikanan budidaya yang terintegrasi;
10. Pelaksanaan Analisa mutu pakan ikan yang beredar dan melakukan pemantauan penggunaan bahan baku/formulasi pakan ikan/pakan alami;
11. Pelaksanaan Analisa usaha budidaya, perlindungan usaha pembudidaya ikan, sarana pembudidaya ikan serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan /kelembagaan pembiayaan usaha budidaya;
12. Pemeliharaan dan perbaikan keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan serta hama penyakit ikan dengan pelaksanaan pencegahan, pengobatan dan pengaturan pemakaian obat ikan;
13. Pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi pemutakhiran dan tabulasi data primer/sekunder;

14. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang Kawasan dan Kesehatan ikan, perbenihan, pakan dan obat ikan dan produksi usaha budidaya; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan nelayan memiliki fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan, pengawasan perikanan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan, pengawasan perikanan dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan serta pengawasan penangkapan ikan dan produk hasil perikanan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha bagi nelayan, perlindungan nelayan dan usaha nelayan kecil, serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan/kelembagaan pembiayaan usaha nelayan kecil;
6. penerbitan rekomendasi penerimaan bantuan masyarakat nelayan di bidang perikanan tangkap baik bantuan provinsi, maupun pusat;
7. penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak untuk nelayan kecil;

8. pelaksanaan pembinaan diversifikasi usaha, pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan dan penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
9. pengumpulan harga komoditi kelautan dan perikanan;
10. pelaksanaan kodefikasi, validasi, verifikasi, pemuktahiran dan tabulasi data primer/sekunder;
11. pelaksanaan analisis data pelaku usaha dan kemitraan dibidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
12. pelaksanaan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang kelembagaan dan perlindungan nelayan, usaha nelayan kecil, pengolahan, pemasaran dan bina mutu produk hasil perikanan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, menyiapkan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan dan distribusi pangan

6. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

F. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.;

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Kesekretariatan dan 4 Bidang. Bagan SOTK Dinas Perikanan dan Pangan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

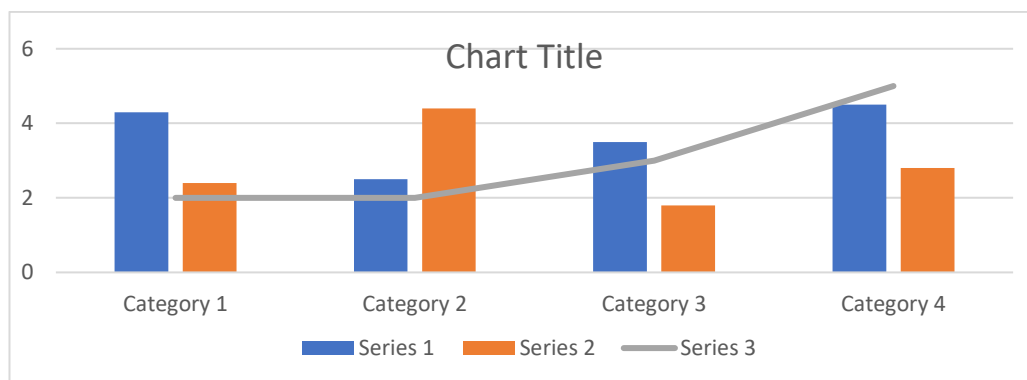
Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN (Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 19 Tahun 2024)

yang cukup besar pada tenaga kontrak untuk mendukung aktivitas teknis maupun administrasi. Kondisi ini menjadi perhatian penting, mengingat arah kebijakan nasional mendorong pengurangan tenaga Non ASN dan peningkatan proporsi ASN/PPPK melalui mekanisme seleksi yang terstruktur.

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 38 orang (57,6%) dan diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 21 orang (31,8%). Lulusan S2 masih relatif sedikit, yaitu 6 orang (9,1%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kualifikasi pendidikan pegawai cukup baik, peningkatan kompetensi melalui pendidikan lanjut masih merupakan peluang pengembangan SDM, terutama untuk jabatan yang membutuhkan kemampuan analitis dan manajerial.

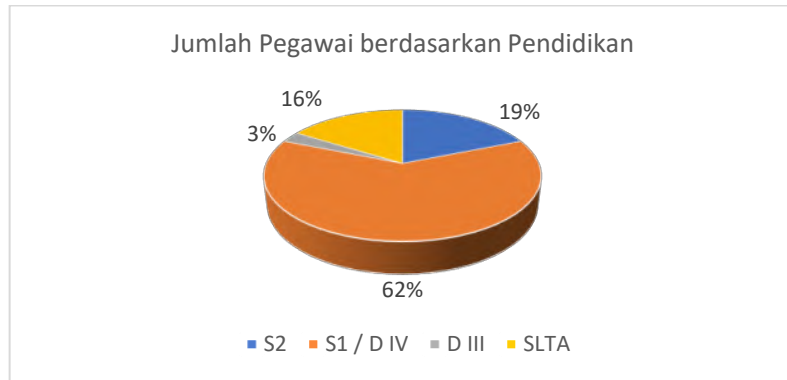
Berdasarkan struktur jabatan, pegawai tersebar pada jabatan struktural, fungsional, pelaksana, PPPK, dan tenaga kontrak. Jabatan struktural terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbag, sementara jabatan fungsional tertentu berjumlah 9 orang, seluruhnya perempuan dengan tingkat pendidikan yang memadai. Jabatan pelaksana berjumlah 19 orang dan didominasi oleh pegawai berpendidikan SMA dan S1. Tenaga kontrak menjadi kelompok besar dengan 30 orang yang memegang peran penting dalam mendukung operasional harian instansi. Namun demikian, data Kepala Dinas belum tercantum sehingga memengaruhi rekapitulasi jabatan eselon II.

Secara umum, komposisi pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 menunjukkan bahwa SDM telah mencukupi dari sisi kuantitas, namun masih memerlukan peningkatan kualitas terutama pada kompetensi teknis, manajerial, dan pendidikan lanjutan. Selain itu, ketergantungan terhadap tenaga Non ASN perlu dikelola melalui strategi rekrutmen ASN/PPPK secara bertahap di masa mendatang.

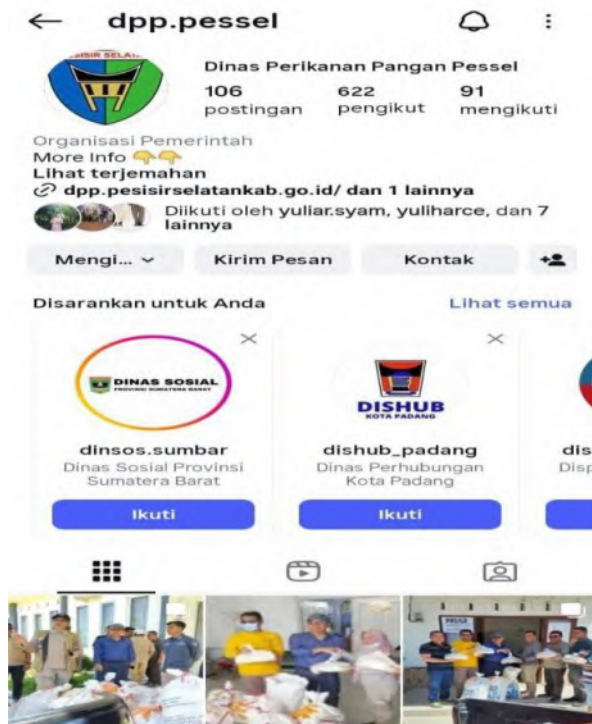


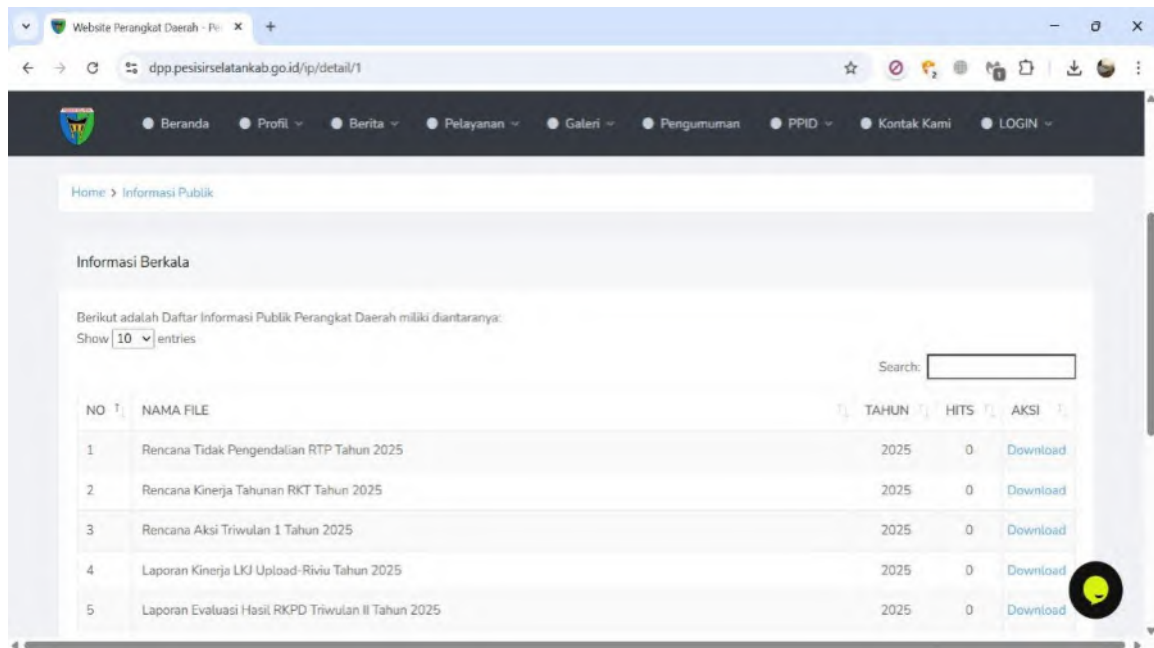
Grafik 1.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sarana Informasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> dan email : dppkabpessel@gmail.com, serta akun Instagram *Dinas Perikanan dan Pangan* Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.





1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan dan Pangan, mengisi pembangunan Perikanan dan Pangan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”***. Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung agenda Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang kedua dan ketiga yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Masyarakat

Misi 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi pemutakhiran Program dan Kegiatan, sehingga Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendukung RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui 8 (delapan) program adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 8) Program pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat yang tidak diimbangi dengan stabilitas produksi, menyebabkan potensi kerawanan pangan dan tekanan terhadap sistem distribus
2. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan kecenderungan kenaikan harga, berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat terutama kelompok rentan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan gizi, yang berisiko memperburuk status gizi dan kerentanan terhadap krisis pangan.
4. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman(B2SA).
5. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
6. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.
7. Daya saing ekonomi daerah, Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal.
8. Belum optimalnya integrasi tata ruang wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya perikanan, sehingga menghambat peningkatan produksi dan efisiensi pemanfaatan lahan.
9. Kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan masih rendah, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun keselamatan kerja, sehingga produktivitas sektor perikanan belum optimal
10. Terbatasnya akses pembudidaya terhadap sarana dan prasarana budidaya perikanan, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya.
11. Rendahnya daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, disebabkan oleh keterbatasan teknologi, kualitas produk, dan akses pasar.

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan ini menjelaskan tentang capaian kinerja tahun 2025 dan dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun

2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhasap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Adapun susunan sistematika penyajian nya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur organisasi dan Sumberdaya manusia. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menyajikan penjelasan secara ringkasan / ikhtiar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasran shtrategis terssebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1 Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Perikanan merupakan dokumen yang menjelaskan secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (82,00)
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,5
3.	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	62.000

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menjabarkan dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai

secara tahunan sesuai periode Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adanya rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah dilakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 pada Bab IV tentang target kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Berita Acara Rasionalisasi Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi diantaranya Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah. Sehubungan peraturan tersebut, maka dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/1132.1/Bapedalitbang/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Revisi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100 \%$	46.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	Urusan Perikanan
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentasi Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras / jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Rata Jumlah Ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	95	100	100	100	100	100	RPJMD	Urusan Pangan
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	Urusan Pangan
	Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)}}$	61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	Urusan Pangan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A	A	A	A
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	$(\text{Produksi} \times \text{Harga Olahan}) - (\text{Produksi} \times \text{harga bahan baku})$			85.885.000.000	86.035.000.000	86.235.000.000	86.485.000.000

Pada akhir tahun 2023 dilaksanakan evaluasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dikoordinir oleh Bapedalitbang. Dari hasil evaluasi tersebut maka pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2024 dilakukan perubahan.

1. Perubahan indikator kinerja utama (IKU) dari "Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan" menjadi "Jumlah Produksi Perikanan" dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dilakukan untuk lebih menyesuaikan dengan fokus kebijakan sektor perikanan. Beberapa alasan utama perubahan ini meliputi:

- Kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengukuran kinerja.
- Perubahan kebijakan atau strategi dalam pengelolaan sektor perikanan.
- Penyesuaian dengan sistem pelaporan yang lebih sederhana dan kuantitatif.
- Meningkatkan keterukuran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung produksi perikanan.

2. Perbandingan Karakteristik Indikator

Aspek	Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan
Definisi	Mengukur peningkatan nilai ekonomi dari produk perikanan setelah diproses atau dikembangkan	Mengukur total produksi perikanan dalam satu periode

Metode Pengukuran	Berdasarkan nilai tambah dari pengolahan hasil perikanan	Berdasarkan volume produksi ikan (ton, kg, atau unit lainnya)
Keunggulan	Menunjukkan dampak ekonomi dari produksi perikanan	Lebih mudah diukur dan dipantau
Kelemahan	Sulit diukur secara langsung dan memerlukan data ekonomi tambahan	Tidak mencerminkan nilai ekonomi atau kualitas hasil produksi

3. Dampak Perubahan

- Terhadap Kebijakan: Pergeseran fokus dari nilai tambah ke produksi mengindikasikan bahwa kebijakan saat ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kuantitas produksi dibandingkan aspek ekonomi dan pengolahan.
- Terhadap Pelaksanaan Program: Program akan lebih diarahkan pada peningkatan produksi perikanan dengan target volume tertentu, dibandingkan dengan pengembangan industri pengolahan.
- Terhadap Pelaporan dan Evaluasi: Pengukuran kinerja akan lebih sederhana dan berbasis data produksi dari unit terkait, seperti dinas perikanan dan statistik produksi perikanan.
- Terhadap Stakeholder: Nelayan dan pelaku usaha perikanan akan lebih fokus pada peningkatan hasil tangkapan atau budidaya dibandingkan pengembangan produk bernilai tambah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			A (81)	A (81,5)	A (82)	A (82,5)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA			100	100	100	100

Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$			82	84	85	87
Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi tahun (n)			53.945	50.694	51.604	52.553

Sumber : Perencanaan Tahun 2025

Perubahan sasaran pada IKU dari "Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan" menjadi "Jumlah Produksi Perikanan" mencerminkan pergeseran fokus kebijakan sektor perikanan ke arah peningkatan produksi. Meskipun lebih mudah diukur, perubahan ini juga memiliki konsekuensi terhadap kebijakan dan strategi pengembangan sektor perikanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang agar produksi meningkat tanpa mengesampingkan nilai tambah ekonomi dari sektor ini.

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perikanan dan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Kegiatan Pendukung Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran/Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Terwujudnya yang Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Sasaran/Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikandan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
4.	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2021-2026. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan 2025
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	Tanpa Satuan	A (82,00)
2		Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100
3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tanpa Satuan	88,5
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	62.000

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Penetapan Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (82,00)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	62.000

Untuk mewujudkan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan melaksanakan 7 program dengan 19 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.308.535.732,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Anggaran Tahun 2025
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.237.355.519
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	356.816.346
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	42.987.200
4	Program Penanganan Keamanan Pangan	18.987.893
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.277.080.884
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	324.988.196
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.072.694
	Jumlah	8.308.535.732

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan skala pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi					
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82,00)	A (81,60)	99,51
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	91	91
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat					
Tujuan 2 : Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat					
2	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,5	88,17	99,63
Misi 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan					
2	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah produksi perikanan (ton)	62.000	61.323,11	98,91
	Rata-rata capaian				97,26

Catatan : *) : Angka realisasi Tahun 2025

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa ke 4 (empat) indikator yang ditetapkan tahun 2025 terlihat rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai 81,60 (A) dari target 82,00 (A) atau dengan predikat “memuaskan”.
- 2) Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,5 dari target yang ditetapkan 88,17 atau dengan capaian 99,63 %. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
- 3) Jumlah Produksi Perikanan dengan realisasi 61.323,11 dari target 62.000 dengan capaian 98,91 %.
- 4) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 91 dari target nilai 100.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 97,26 % atau melebihi target yang telah ditetapkan, keberhasilan pencapaian ini termasuk kategori “sangat baik”

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 7 (tujuh) program pendukung dengan realisaswi seperti tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Program	APBD Tahun 2025 (Rp)	APBD Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.496.798.093	5.237.355.519	5.076.251.438	96,92	161.104.081
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.459.683	356.816.346	29.693.5902	83,22	59.880.444
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	32.999.750	42.987.200	40.230.000	93,59	2.757.200
4.	Program Pengawasan Kerawanan Pangan	25.000.247	18.234.893	16.847.940	92,39	1.386.953
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.241.606.868	2.277.080.884	1.974.289.512	86,70	302.791.372
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	633.603.766	324.988.196	240.829.275	74,10	84.158.921
7.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	120.010.914	51.072.694	44.295.069	86,73	6.777.625
	Jumlah	8.939.479.321	8.308.535.732	10.437.978.315	92,55	618.856.596

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian tersebut, menunjukkan kesungguhan dan komitmen Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perikanan dan pangan tahun 2025.

3.1.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan misi 1, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Instansi Dinas Perikanan dan Pangan.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2025

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja 1 dapat disajikan sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja
Sasaran 1 Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82,00)	A (81,60)	99,51
	Jumlah					99,51

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan dan Pangan dengan nilai A atau 81,60 dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator kinerja
Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 - 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,50)	A (82,00)	A (80,97)	A (81,46)	A (81,60)	99,96	99,95	99,51

*Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024*
Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,60)	A (82,50)	98,91

*Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024*
Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar	Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,60)	A (80,54)*	84,01*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024

Sumber : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar tahun 2024

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2024

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis	Solusi yang Dilakukan
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82,00)	A (81,60)*	99,51	belum optimalnya evaluasi internal secara berkala	-Pengelolaan SDM -Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja -Struktur Tata Kelola -Budaya dan Hubungan Organisasi

Catatan : *) Hasil Evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan *Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.9
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Strategis 1

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (20 orang Analis Ketahanan Pangan dan 30 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (9 orang Analis Ketahanan Pangan dan 15 orang pada Bidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan dan bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi nggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya perbaikan Gedung kantor, penambahan mobile dan peralatan kantor	Optimalisasi penggunaan Sarana dan prasarana yang ada

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja *dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah* adalah sebesar Rp. 5.237.355.519,- dan terealisasi Rp. 5.076.251.438,- (96,92%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar uraian tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2025	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.237.355.519	5.071.879.178	96,84	100,00	158.986.591
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.421.545	60.504.777	93,92	100,00	3.916.768
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.513.975	38.273.728	94,47	100,00	2.240.247
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.907.570	22.231.049	92,99	101,00	1.676.521
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.401.884.362	4.323.120.054	98,21	100,00	78.764.308
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.177.513.872	4.118.848.550	98,60	100,00	58.665.322
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.430.000	190.582.480	90,57	100,00	19.847.520
	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.940.490	13.689.024	98,20	100,00	251.466
4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.989.750	1.372.260	68,97	100,00	617.490
	6 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.989.750	1.372.260	68,97	100,00	617.490
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	3.000.000	66,67	100,00	1.500.000
	7 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	3.000.000	66,67	100,00	1.500.000
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.910.808	214.353.829	84,09	100,00	40.556.979

	8	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.892.671	8.854.350	59,45	100,00	6.038.321
	9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.720.000	13.100.000	88,99	100,00	1.620.000
	10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.671.401	34.807.360	85,58	100,00	5.864.041
	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.001.966	22.780.710	91,12	100,00	2.221.256
	12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	4.104.000	76,00	100,00	1.296.000
	13	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000	2.074.680	51,87	100,00	1.925.320
	14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.870.000	124.760.368	85,53	100,00	21.109.632
	15	Sub Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.354.770	3.872.361	88,92	100,00	482.409
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.611.004	226.782.612	90,85	100,00	22.828.392
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.000	74.573.822	79,67	100,00	19.026.178
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.011.004	152.208.790	97,56	100,00	3.802.214
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.038.050	247.117.906	95,03	100,00	12.920.144
	18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.700.000	45.861.174	80,88	100,00	10.838.826
	19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.880.050	122.026.732	98,50	100,00	1.853.318
	20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.450.000	28.450.000	100,00	100,00	-
	21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.008.000	50.780.000	99,55	100,00	228.000
		JUMLAH	5.237.355.519	5.076.251.438	96,92	100,00	161.104.081

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) tertuang dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020, yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(5.237.355.519 \times 99,51\%) - 5.076.251.438}{(5.237.355.519 \times 99,51\%)} \times 100\% \\ &= 2,60\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 2,60% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 adalah A (82,00), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 sebesar A (81,60) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,51%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,14 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A (81,46).

Gambar 3.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,09
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		81,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a. dalam melakukan rasionalisasi Renstra agar memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran dan target yang akan dirasionalisasi
 - b. dalam merumuskan indikator kinerja utama agar dituangkan secara berkelanjutan dan tidak sering diganti dalam periode renstra.
 - c. menetapkan target kinerja dengan memperhatikan unsur dapat dicapai (achievable) dan menjadikan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan merumuskan target kinerja berikutnya.
 - d. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja

Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a. agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark kinerja) untuk setiap indikator kinerja;

- Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

RESTRUKTURISASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGKAS KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2024							
No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Pemangung Jawab	Status/Progres	Koordinator
1. Perencanaan Kinerja							
a.	Dalam melakukan realisasi Rencana kerja memfasilitasi koordinasi tugas, wewenang, target yang akan dilaksanakan	Melakukan pengkoordinasian Rencana kerja memiliki perencanaan tugas wewenang dan target	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Tetap selesai	LHE R.L.A Rendra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
b.	Dalam memonitor indikator Kinerja Utama agar diwujudkan secara berkesinambungan dan tidak sering diganti dalam periode rencana	Memonitor indikator yang berdasarkan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dalam Rencana	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Tetap selesai	LHE R.L.A Rendra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
c.	Mengintegrasikan Target Kinerja dengan memperhatikan unsur yang dapat diukur (achievable)	Memonitor target kinerja yang dapat diukur dalam rencana	1 Dokumen	Triwulan I - Triwulan III	Kepala Dinas	Tetap selesai	LHE R.L.A Rendra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029
d.	Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Mengajukan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas	2 Dokumen	Triwulan I	Kepala Dinas	Tetap selesai	LHE R.L.A Rendra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja” dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan dengan target A (82,00) dengan realisasi A (81,60) dengan pencapaian kinerja 99,51 %.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 telah melaksanakan 1 program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

Kegiatan terdiri dari :

- ## LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.076.251.438,- atau 96,92 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.237.355.519,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,08%.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) Indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Sasaran Strategis 2 Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	91.00	91.00
	Jumlah			91.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa inovasi yang dilakukan oleh bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan makan ikan), pemanfaatan inovasi dalam kegiatan : Sosialisasi Gemarikan di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Pesiir Selatan Tahun 2023. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini terlihat dari data AKI Tahun 2022 (47,38 kg/kapita) meningkat pada Tahun 2023 (47,51 kg/kapita). Penurunan angka Stunting Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2022 (29,8%) dan setelah adanya Inovasi angka stunting pada tahun 2023 (27%). Dari hasil inovasi tersebut nilai kematangan inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah 91.00.

a. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	91.00	91.00
Rata-Rata Capaian						91.00

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100	63.00	93.00	91.00	63	93	91

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Tabel tersebut menyajikan perbandingan antara target, realisasi, dan persentase capaian indikator kinerja *Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah* pada sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

Target indikator ditetapkan konstan sebesar 100 pada setiap tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kematangan inovasi yang optimal secara berkelanjutan.

Realisasi indikator menunjukkan perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun, yang selanjutnya diukur dalam bentuk persentase capaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023, realisasi *Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah* mencapai **63,00** dengan tingkat capaian sebesar **63%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi daerah masih berada pada tahap penguatan dasar, khususnya dalam aspek tata kelola inovasi, kelembagaan, serta pemenuhan indikator pendukung inovasi.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator meningkat signifikan menjadi **93,00** atau **93%** dari target. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian inovasi di perangkat daerah, termasuk meningkatnya jumlah inovasi yang terdokumentasi dan dinilai secara sistematis.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator mencapai **91,00** atau **91%**. Meskipun terjadi penurunan tipis dibandingkan Tahun 2024, capaian ini masih berada pada kategori

kinerja sangat baik. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas dan keberlanjutan inovasi, atau adanya peningkatan standar penilaian kematangan inovasi.

Perkembangan capaian tersebut juga menunjukkan bahwa sistem inovasi perangkat daerah semakin matang, namun membutuhkan penguatan lanjutan pada aspek keberlanjutan inovasi, replikasi inovasi unggulan, serta integrasi inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indikator kinerja selama periode Tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah** menunjukkan hasil yang positif dan progresif. Meskipun target belum tercapai secara penuh, capaian yang diperoleh telah mendekati target dan mencerminkan kinerja yang efektif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91.00	100	91.00

Sumber : Data Susenas BPS Tahun 2025

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa sasaran **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah** telah dicapai dengan hasil yang optimal dan progresif. Meskipun target akhir belum sepenuhnya tercapai, capaian yang diperoleh mencerminkan kinerja yang efektif dan berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target strategis organisasi pada akhir periode perencanaan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100	91.00	91.00	Inovasi ini mampu menjawab permasalahan rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan promosi konsumsi ikan yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan gizi masyarakat	1. penguatan kepemimpinan dan budaya inovasi 2. peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan 3. penyediaan dan optimalisasi anggaran inovasi 4. peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi.

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Gambar 3.3. Nilai kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025



f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan pangan tahun 2025 Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini mencakup alokasi penganggaran yang tepat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Penggunaan

sumber daya yang efisien berkontribusi pada hasil yang optimal dalam program-program yang dilaksanakan.

Tabel 3.16
Dukungan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
F	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	51.072.694	44.295.069	86,73	100,00	6.777.625
16	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.384.000	5.333.800	99,07	100,00	50.200
34	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	5.384.000	5.333.800	99,07	100,00	50.200
16	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.604.894	11.151.731	96,10	100,00	453.163
34	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	11.604.894	11.151.731	96,10	100,00	453.163
17	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	34.083.800	27.809.538	81,59	100,00	6.274.262
35	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.083.800	27.809.538	81,59	100,00	6.274.262
	JUMLAH	51.072.694	44.295.069	86,73	100,00	6.777.625

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(51.072.694 \times 91\%) - 44.295.069}{(51.072.694 \times 91\%)} \times 100\% \\
 &= \frac{2.181.083,54}{46.476.152,54} \times 100\% \\
 &= 4,70\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 4,70%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan/inovasi **GEMARIKAN** mampu mencapai **91% kinerja** dengan realisasi anggaran yang **lebih rendah** dari anggaran efektif yang seharusnya digunakan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara **efisien**, dengan tetap menghasilkan kinerja yang tinggi. Efisiensi ini mencerminkan perencanaan kegiatan yang tepat, pengendalian anggaran yang baik, serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah**.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu : Program Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Realisasi program/kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebesar Rp. 44.295.069,- atau 86,73% dari total anggaran sebesar Rp. 51.072.694,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 13,27% dengan capaian fisik 100 %.

Dalam mewujudkan misi 2, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH).

Pencapaian tingkat konsumsi baik energi maupun protein dalam 5 tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan
Skor Maksimal PPH (tahun 2021,2022, 2023,2024,2025)

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2021	Skor PPH 2022	Skor PPH 2023	Skor PPH 2024	Skor PPH 2025
1	Padi-padian	25,0	25,0	25.0	25.0	25.0	25.00
2	Umbi-umbian	2,5	0,7	0.6	0.8	0.6	0.83
3	Pangan Hewani	24,0	18,9	19.5	20.9	21.9	22.95

4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5.0	5.0	5.0	5.00
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1.0	1.0	1.0	1.00
6	Kacang-kacangan	10,0	2,5	4.4	4.9	4.3	5.03
7	Gula	2,5	1,8	1.8	1.6	1.6	1.92
8	Sayur dan Buah	30,0	25,6	29.6	29.7	28.8	30.00
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Jumlah	100,0	80,4	86.9	88.9	88.2	91.72

Keterangan: 1) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004);

2) AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018);

3) Bobot kelompok pangan digunakan untuk penghitungan skor PPH nasional dan regional.

4) Data diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004.

5) Skor PPH Regional digunakan sebagai standar/acuan komposisi pangan ideal Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

6) Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi pangan ideal.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Skor PPH} &= \frac{\text{Jumlah Skor PPH}}{\text{Jumlah Skor Maximum}} \times 100\% \\
 &= \frac{91,72}{100} \times 100\% \\
 &= 91,72 \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{91,72}{88,50} \times 100\% = 103,64\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimum PPH, tetapi meningkat dibandingkan 5 tahun terakhir.

Berdasarkan data Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2025, terlihat adanya **tren peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat** yang konsisten dan cukup signifikan. Skor PPH total meningkat dari **80,4 pada tahun 2021** menjadi **91,72 pada tahun 2025**, atau mengalami kenaikan sebesar **11,32 poin** dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan menuju pola konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang, dan sesuai dengan skor maksimal PPH (100). yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan dan peningkatan gizi Masyarakat.

1. Kelompok Pangan dengan Capaian Optimal

Beberapa kelompok pangan telah **konsisten mencapai skor maksimal**, antara lain:

- Padi-padian (25,00)
- Minyak dan Lemak (5,00)
- Buah/Biji Berminyak (1,00)

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan, aksesibilitas, dan pola konsumsi pangan pokok masyarakat telah berada pada tingkat yang sangat baik dan stabil selama periode evaluasi.

2. Kelompok Pangan dengan Peningkatan Signifikan

Kelompok pangan yang menunjukkan **tren peningkatan positif**, antara lain:

- **Pangan Hewani**, meningkat dari **18,9 (2021)** menjadi **22,95 (2025)**, mendekati skor maksimal 24,00. Hal ini mencerminkan meningkatnya konsumsi protein hewani sebagai dampak dari perbaikan pendapatan, edukasi gizi, serta dukungan program pangan dan perikanan.
- **Kacang-kacangan**, meningkat dari **2,5** menjadi **5,03**, meskipun masih berada di bawah skor maksimal 10,00. Peningkatan ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran konsumsi protein nabati.
- **Sayur dan Buah**, yang berhasil mencapai **skor maksimal 30,00 pada tahun 2025**, menandai keberhasilan intervensi edukasi gizi dan pemanfaatan pangan lokal.

3. Kelompok Pangan yang Masih Perlu Perhatian

Beberapa kelompok pangan masih menunjukkan **gap terhadap skor maksimal**, antara lain:

- **Umbi-umbian**, dengan skor **0,83** dari **maksimal 2,50**, mencerminkan masih rendahnya diversifikasi pangan berbasis sumber karbohidrat non-beras.
- **Gula**, dengan skor **1,92** dari **maksimal 2,50**, menunjukkan konsumsi yang relatif terkendali namun masih belum optimal sesuai proporsi PPH.

4. Implikasi Capaian Skor PPH

Secara keseluruhan, capaian **Skor PPH 91,72 pada tahun 2025** menempatkan Kabupaten Pesisir Selatan pada kategori **sangat baik**, serta mencerminkan:

- Keberhasilan program diversifikasi dan edukasi konsumsi pangan
- Meningkatnya keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan
- Kontribusi positif sektor perikanan, pertanian, dan pangan terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia

Namun demikian, masih diperlukan **penguatan kebijakan dan program promotif** untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal non-beras (umbi-umbian dan kacang-kacangan) guna mendekati skor PPH maksimal secara berkelanjutan.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	88,50	91,72	103,64

Sumber :Data SusenasBPS Tahun 2025

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator pencapaian skor PPH selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	87	82	82	87	88,50	80,4	86,9	88,9	88,2	91,72	92,41	105,97	108,41	101,37	103,64

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikastor Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	91,72	88,50	103,64	Dengan semakin beragamnya konsumsi Masyarakat akan meningkatkan pencapaian skor PPH mendekati ideal.

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Standar Provinsi dan Nasional, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Badan Pangan Nasional
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor (PPH) Pola Pangan Harapan	91,72	93,4	94,1

Sumber :Data Susenas BPS Tahun 2025

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini

Tabel 3.22
Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Faktor Keberhasilan	Hambatan yang dihadapi	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	- Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri. - Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri - Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi	- Keterbatasan Sosialisasi Program peningkatan Pola Pangan Harapan belum merata diterima oleh masyarakat. - Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). - Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal. - Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu. - Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.	- Meningkatkan promosi/kampanye pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam melaksanakan edukasi /sosialisasi kepada masyarakat. - Intervensi Kebijakan, telah dilakukan pemberian bantuan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan balita di daerah rawan pangan. - Mempromosikan Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya <i>menu/snack</i> yang disediakan adalah pangan lokal. - Meningkatkan pengelolaan jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan <i>stakeholder</i> dan <i>off taker</i> terkait untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan. - Pengembangan Sumber Daya Manusia pelaku usaha

			6. Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.	pengolahan pangan lokal dalam bentuk Pelatihan maupun Bimbingan Teknis baik dalam bentuk pengolahan pangan lokal, manajemen usaha, kewirausahaan dan strategis bisnis pengolahan pangan lokal.
--	--	--	--	--

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator kinerja *Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan*, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.

Tabel 3.23
Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Strategis 3

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (6 orang Analis Ketahanan Pangan dan 20 orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (3 orang Analis Ketahanan Pangan dan 7 orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan, Bimbinagn Teknis Pengolahan Pangan Lokal, pelaksanaan Gerakan/Kampanye Pangan B2SA serta bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan miskin dengan *Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* adalah sebesar Rp. 623.308.315,- dan terealisasi Rp. 552.729.854,- (88,68 %). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,32% dengan uraian tabel di bawah ini

Tabel 3.24
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2024	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
B.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	560.793.415	498.994.504	88,98	100,00	61.798.911
7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
	23 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	299.999.860	276.097.554	92,03	100,00	23.902.306
8	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	235.000.005	197.138.650	83,89	100,00	37.861.355
	24 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210.112.000	187.387.000	89,18	100,00	22.725.000
	25 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.888.005	9.751.650	39,18	100,00	15.136.355
9	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
	26 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.793.550	25.758.300	99,86	100,00	35.250
C	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	62.514.900	53.735.350	85,96	100,00	8.779.550
10	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
	27 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.252.000	27.480.350	90,84	100,00	2.771.650
11	Kegiatan Penanganan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
	28 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	32.262.900	26.255.000	81,38	100,00	6.007.900
	JUMLAH	623.308.315	552.729.854	88,68	100,00	8.779.550

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(623.308.315 \times 108,41 \%) - 552.729.854}{(623.308.315 \times 108,41 \%)} \times 100\% \\ &= \\ &= 22,25 \% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui efesiensi bahwa dalam penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 22,25% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 3. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2025 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.25
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	560.793.415	498.994.504	88,98
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	62.514.900	53.735.350	85,96
	Jumlah	623.308.315	552.729.854	88,68

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Berikut Program yang mendukung capaian sasaran strategis 3 mencakup :

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketersediaan Pangan, sehingga cukup memenuhi kebutuhan pangan. Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 356.816.346,- dengan realisasi sebesar Rp. 296.935.902,- atau 83,22 %. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

I. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan,

a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.814.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.561.221,- atau 85.08 %. Adapun uraian pekerjaan pada sub kegiatan ini meliputi :

1. Pemanfaatan lahan pekarangan (Urban Farming) yaitu upaya mendorong keluarga menanam berbagai jenis tanaman (sayuran, buah dan ternak) di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan keluarga.
2. Edukasi dan pendampingan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada keluarga yang memiliki balita stunting dan gizi buruk dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan pengolahan pangan keluarga dan pentingnya konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengolahan Pangan Keluarga untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

3. Diversifikasi pangan untuk mendorong penanaman berbagai jenis tanaman berupa sayuran, umbi-umbian, buah, ternak kecil dan perikanan untuk mengurangi resiko kekurangan pangan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan pangan juga bermitra dengan TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari serta Kader Pangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai penyusun kebijakan dan pengelolaan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga tahun 2025 yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan melaksanakan pemberian bantuan bibit tanaman dan ternak ayam untuk pemanfaatan lahan pekarangan kepada 30 keluarga yang memiliki balita stunting dan gizi buruk di beberapa nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu Nagari Batu Hampar Selatan, Pulau Karam Ampang Pulau, Kapuh Utara, Teluk Raya Setara Nanggalo, Jinang Kampung Pansur dan Naggalo.

Bantuan yang diberikan kepada keluarga tersebut yaitu :

- Bibit Tanaman Cabe sebanyak 7 batang/orang
- Bibit Tanaman Terong sebanyak 7 batang/orang
- Bibit tanaman Cabe rawit sebanyak 7 batang/orang
- Bibit Tanaman Alpukad sebanyak 1 batang/orang
- Ternak ayam sebanyak 3 ekor/orang (2 betina, 1 jantan)

2. Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk pencegahan dan Penurunan Stunting serta Demonstrasi kreasi Menu untuk balita pada tanggal 23 September 2025 di Kecamatan Koto XI Tarusan.

terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan keluarga sasaran dalam pemanfaatan lahan pekarangan, teknik budidaya tanaman dan ternak serta pengolahan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Masih tendahnya partisipasi dan komitmen sebagian masyarakat dalam mengikuti pelatihan maupun pendampingan masih rendah, baik karena kesibukan, kurangnya motivasi maupun anggapan bahwa kegiatan belum menjadi kebutuhan utama.
3. Tidak semua keluarga memiliki lahan pekarangan yang memadai dan sesuai untuk budidaya tanaman pangan dan ternak, sehingga pemanfaatannya belum maksimal.
4. Masih adanya keterbatasan sarana pendukung seperti bibit berkualitas, pakan ternak, pupuk, peralatan budidaya serta media tanam masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat.
5. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan masih rendahnya angka kecukupan gizi balita khususnya pada keluarga dengan kasus stunting.
6. Masih kurangnya jumlah kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang edukatif untuk meningkatkan SDM kader, pengurus TP PKK dan masyarakat.
7. Masih terbatasnya anggaran untuk tindakan aksi berupa stimulasi pemberian bantuan kepada kelompok dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber ketahanan pangan keluarga.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah diatas adalah :

1. Meningkatkan kapasitas keluarga sasaran. Melalui edukasi dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman dan ternak skala rumah tangga, serta pengolahan pangan B2SA yang mudah diterapkan dan berbasis lokal.
2. Penguatan pendampingan dan monitoring kegiatan melalui kunjungan lapangan, kelompok belajar dan pemanfaatan kader pangan, TP PKK untuk memastikan bantuan dan ilmu yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten.

3. Mendorong penerapan teknologi sederhana dalam pengelolaan pemanfaatan lahan pekarangan seperti vertikultur, hodroponik sederhana.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral (PKK, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, kader kesehatan, dan pemerintahan nagari guna mendukung keberlanjutan program.
5. Mendorong kemandirian dan keberlanjutan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan cara mengembangkan kelompok pangan keluarga sebagai wadah berbagi pengalaman dan pemanfaatan hasil pekarangan secara mandiri.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Pelatihan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Pemanfaatan Lahan Pekaragan dan Peningkatan Konsumsi panagan B2SA dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Koto XI Tarusan.



2. Penyerahan bantuan bibit tanaman dan ternak ayam untuk pemanfaatan lahan pekarangan pada keluarga stunting di Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan.



b) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen

Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 80.637.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.505.850,- atau 70.07 %.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Peman Pemantauan Harga Pangan Tingkat Konsumen dan Produsen

Pemantauan harga pangan pokok strategis dilakukan di tingkat produsen (petani/penggilingan/peternak) dan konsumen (eceran/pasar tradisional) secara berkala (harian/mingguan) oleh Enumerator. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, menjamin ketersediaan pasokan, serta memastikan harga yang layak di tingkat produsen sekaligus terjangkau oleh konsumen.

Dokumentasi kegiatan



2. Operasi Pasar

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang pokok kebutuhan masyarakat. Tujuan dari Operasi Pasar ini adalah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di pasar-pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Dokumentasi kegiatan



3. Gerakan Pangan Murah

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan (SPHP), mengendalikan inflasi pangan, memitigasi dampak kenaikan harga, dan meningkatkan aksesibilitas serta daya beli masyarakat. Komoditas yang disediakan yaitu Fokus pada volatile foods (bahan pangan bergejolak) seperti beras, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, serta cabai. Adapun waktu pelaksanaannya dilaksanakan sepanjang tahun, terutama pada momen strategis seperti Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), atau saat terjadi lonjakan harga. Mekanisme Pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah pusat, daerah, BUMN (Bulog, ID FOOD), Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan produsen/pelaku usaha, dengan penjualan langsung kepada masyarakat (bisa menggunakan kupon atau bazar terbuka)

Dokumentasi kegiatan



- c) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Pokok Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.482.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.326.600,- atau 88.60 %,

Pelaksanaan monitoring pengembangan penggilingan padi kecil difokuskan pada pengawasan stok gabah/beras (mingguan/bulanan), efisiensi mesin, dan kualitas hasil produksi (kadar air & persentase beras pecah). Pemantauan ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan nasional, efisiensi usaha mikro/kecil, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengetahui jumlah stok gabah/beras secara periodik, merumuskan kebijakan pangan, dan memantau kinerja mesin pengupas (husker) dan penyosok.

Dokumentasi Monitoring Penggilingan Padi Kecil



II. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Kabupaten/Kota

kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

- a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan pengadaan cadangan pangan pemerintah berupa beras bekerjasama dengan Bulog, untuk tahun ini pengadaan beras adalah sebanyak 10 Ton. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 142.056.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.534.660,- atau 91,89 %.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah



b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras pada saat adanya kejadian bencana alam. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.893.273,- atau 35,57 %.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bencana alam merupakan bentuk perlindungan sosial dan tanggap darurat yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pangan bersama Perum Bulog. Bantuan disalurkan berupa beras untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat terdampak, dengan alokasi harian yang diatur secara spesifik. Adapun penyaluran yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam pada Bulan November tahun 2025 sebanyak 24.000 Kg

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah





III. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

a) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menghasilkan keanekaragaman Pangan sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.823.846,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.114.298,- atau 98,60 %, Pelaksanaan pada Sub kegiatan ini berupa :

Adapun uraian pekerjaan pada sub kegiatan ini meliputi :

1. Pemberian bantuan bibit tanaman dan ternak ayam untuk kelompok Masyarakat yaitu Anggota Dasa Wisma
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan pengolahan serta konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan Sosialisasi Gerakan Sadar konsumsi Pangan B2SA untuk Pencegahan Stunting dan Edukasi B2SA Goes To School kepada pelajar.
3. Melakukan upaya promosi dan pengembangan kreasi dan inovasi tentang pengolahan pangan lokal dan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) masyarakat.
4. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam meningkatkan ketersediaan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan rumah (KRPL).

5. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal oleh kelompok masyarakat anggota TP-PKK melalui fasilitasi bantuan Rumah Pangan B2SA hibah Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan pangan bermitra dengan TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari serta Kader Pangan. Untuk itu perlu saling menunjang antara Dinas Perikanan dan Pangan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai penyusun kebijakan dan pengelolaan pangan ikut mendukung Program Kerja TP-PKK TP-PKK khususnya Pokja 3 dalam membina kader, kelompok dan masyarakat sehingga tujuan dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dapat dicapai. Hal ini pada akhirnya akan ikut meningkatkan konsumsi pangan dengan pola beragam, bergizi seimbang dan aman dapat tercapai yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sosialisasi, edukasi, fasilitasi dan promosi. Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2025 sudah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan melaksanakan pemberian bantuan bibit tanaman dan ternak ayam untuk pemanfaatan lahan pekarangan kepada kelompok masyarakat yaitu anggota kelompok : Dasa Wisma Seroja 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 di Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.

Bantuan yang diberikan kepada anggota Dasa Wisma yaitu berupa :

- Bibit Tanaman Cabe sebanyak 5 batang/orang
- Bibit Tanaman Terong sebanyak 5 batang/orang
- Bibit tanaman Bayam sebanyak 5 batang/orang
- Bibit Tanaman Kangkung sebanyak 5 batang/orang
- Bibit Tanaman Alpukat sebanyak 1 batang/orang
- Ternak ayam sebanyak 3 ekor/orang (2 betina, 1 jantan)

2. Sosialisasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk pencegahan dan Penurunan Stunting dan Demonstrasi Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada tanggal 26 Juni 2025 di Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
3. Melaksanakan Edukasi Konsumsi Pangan B2SA Goes To School kepada 100 orang pelajar dan 3 orang guru pendamping di SMPN I Bayang pada tanggal 20 November 2025.
4. Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan kelompok Wanita tani dalam Pemanfaatan Pekarangan serta apresiasi penilaian lomba kelompok berprestasi dalam mengembangkan Bantuan KRPL Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun sebelumnya yaitu KWT. Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
5. Berpartisipasi dalam mengikuti lomba Pengolahan Pangan, Lomba Pangan Got Talent tingkat Sekolah Menengah Atas dan Lomba Apresiasi Kelompok Pengembangan KRPL Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dilaksanakan di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2025.
6. Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan kelompok Wanita tani dalam Pemanfaatan Pekarangan serta apresiasi penilaian lomba kelompok berprestasi dalam mengembangkan Bantuan KRPL Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun sebelumnya yaitu KWT. Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelompok penerima bantuan Rumah Pangan B2SA dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - Rumah Pangan B2SA PKK Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan
 - Rumah Pangan B2SA PKK Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera.
 terdapat beberapa permasalahan antara lain :
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

2. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan masih rendahnya angka kecukupan gizi balita khususnya pada keluarga dengan kasus stunting.
3. Masih kurangnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang edukatif tentang pentingnya Konsumsi Pangan B2SA untuk meningkatkan SDM kader, pengurus TP PKK dan masyarakat
4. Masih terbatasnya anggaran untuk tindakan aksi berupa stimulasi pemberian bantuan kepada kelompok dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber ketahanan pangan keluarga

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah diatas adalah :

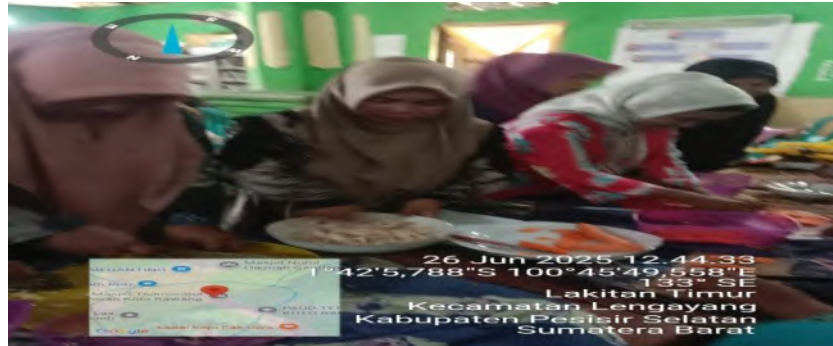
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi, promosi, kreasi, inovasi dan fasilitasi pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat, TP PKK, kader, penyuluh dan untuk keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak dengan kasus stunting.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberian bantuan pemanfaatan pekarangan rumah pangan lestari (KRPL) kepada kelompok wanita tani dan keluarga sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA Untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting di Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.



Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan membuka acara Sosialisasi Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA dalam rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting.



Peserta sedang praktek menyusun menu kreasi untuk balita stunting.

Mengikuti Lomba Pengolahan Pangan Lokal, Pangan Got Talent dan Festival Minang Kulinary tingkat Prop. Sumbar di Padang.



Peserta Lomba Pengolahan Pangan Lokal B2SA Tahun 2025 utusan dari Kabupaten Pesisir Selatan yaitu TP PKK Kecamatan Lunang yang didampingi oleh TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan.



Menu Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Peserta Lomba Apresiasi Pengembangan KRPL mendapatkan juara 3 Tingkat Provinsi Sumbar dimpingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan beserta Tim.



Stand Peserta Lomba Festival Minang Day Kullinary Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili oleh Kelompok Saiyo Kecamatan Ranah Pesisir

Menghadiri Sosialisasi Kegiatan Rumah Pangan B2SA PKK Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Bantuan Hibah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Melaksanakan pembinaan sekaligus menghadiri acara Bimtek Pengolahan pangan local pada Kegiatan Rumah Pangan B2SA PKK Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera .

Launching Rumah Pangan B2SA PKK Nagari Jinang Kampung Pansur Oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan Ibu DR.Hj.Lisda Hendrajoni, SE, M.MTr didampingi Kadis Pangan Prov.Sumbar Bapak Iqbal Dwi Payana, S.STP.



Photo Bersama Ketua TP.PKK Kab.Pesisir Selatan dengan anggota PKK Nagari Jinang Kampung Pansur pada acara Launcing Rumah Pangan B2SA.

Edukasi Konsumsi Pangan B2SA Goes To School di SMAN I Bayang.



Bermitra dengan TP PKK dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan.



Pembinaan KWT.Cahaya Gurami di Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang.

Koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat terkait Program dan Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahun 2025.



Penyerahan Bantuan Bibit Tanaman dan Ternak ayam untuk pemanfaatan lahan pekarangan pada Kelompok Dasa Wisma Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.



Pendampingan KWT Cahaya Gurami pada Penilaian Lomba Apresiasi Pengembangan KRPL tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2025.





Tim juri bersama anggota KWT Cahaya Gurami pada acara Penilaian lomba apreisiai Pengembangan KRPL Tingkat Prov.Sumbar tahun 2025

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin yg terkena rawan pangan transien sehingga menjamin pasokan pangan yang stabil. Pagu Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.987.200,- dengan Realisasi sebesar Rp. 40.230.000,- atau 93,58%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

I. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan , kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan

a) Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanaan Pangan. Sub kegiatan ini bertujuan ketersediaan Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif dan tertata dengan baik. Pagu Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 42.987.200,- dengan Realisasi sebesar Rp. 40.230.000,- atau 93,58 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Peta Ketahanan Pangan (FSVA).

Rapat Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



Dalam mewujudkan misi 3, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan

Pemanfaatan sumberdaya perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dengan potensi yang besar, perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis 4 didukung oleh indikator kinerja produksi perikanan baik produksi budidaya maupun produksi tangkap, dengan capaian kinerja. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.26
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	62.000	61.323,11	98,91
Rata-rata Capaian					98,91

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahawa target indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2025 mendekati target dengan capaian 98,91 % dengan prediksi sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan (Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap).

Formulasi Peningkatan Produksi Perikanan ini adalah :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Jumlah Produksi Tahun } (n)$$

Capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan ini diperoleh datanya dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, yang dikelola oleh Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Nelayan. Produksi Perikanan pada tahun 2025 target sebesar 62.000 ton, dengan realisasi 61.323,11 ton (98,91 %).

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan
Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produksi Perikaan Budidaya	Ton	14.278	14.490	14.608	15.918,82
2.	Jumlah Produksi Perikaan Tangkap	Ton	35.907	58.404,99	46.334,68	45.404,29
	Jumlah		50.185	72.894,99	60.942,68	61.323,11

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Sektor budidaya menunjukkan kinerja stabil, terkontrol, dan relatif tidak terpengaruh fluktuasi eksternal seperti cuaca laut. Dimana tren realisasi meningkat konsisten setiap tahun.
2. Sektor Produksi tangkap sangat fluktuatif dan dipengaruhi faktor eksternal (cuaca, musim ikan, stok sumber daya, biaya operasional).

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari upwelling yang terjadi di perairan laut. Dimana Upwelling (pembalikan massa air) adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena ini membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan tersebut. Peningkatan biomassa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut.

Karena air dari kedalaman yang dibawa ke permukaan seringkali mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, upwelling pada pesisir dapat membantu pertumbuhan rumput laut dan plankton. Selanjutnya, rumput laut dan plankton menjadi penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan, mamalia laut, dan burung-burung di daerah tersebut. Dan itu telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.28
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2025

Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35.549	35.727	35.906	36.086	46.522	35.549	35.907	58.405	46.334,68	45.404,29	100	100,50	162,66	128,40	97,60
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	13.250	13.913	13.913	14.608	15.478	14.278	14.490	14.490	14.608	15.918,82	111,68	107,76	104,15	100,00	102,85
Jumlah	48.167	48.977	49.819	50.694	62.000	49.641	50.185	72.895	60.942,68	61.323,11	105,84	104,13	133,41	120,22	98,91

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Target produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 realisasi produksi perikanan tangkap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 35.549 ton atau dengan capaian 100 %. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian produksi perikanan tangkap meningkat 100,50 % dari target yaitu 35.727 ton dengan realisasi 35.907 ton. Dan pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu 162,66 % dari target tahun 2023 sebesar 35.906 ton dengan realisasi sebesar 58.405 ton dan tahun 2024 produksi perikanan tangkap masih meningkat dari target 36.086 ton dengan realisasi 46.334,68 ton atau sebesar 128,40 %, dari hasil 2 tahun terakhir merupakan dampak dari fenomena upwelling yang membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan sehingga berkontribusi meningkatkan produksi perikanan tangkap.dan pada tahun 2025 capaian produksi perikanan 97,60 % dari target 46.522 ton dengan realisasi 45.404,29 ton. Untuk produksi budidaya meningkat konsisten setiap tahunnya.

c. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian Indikator Jumlah Perikanan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	61.323,11	62.000	98,91	kemajuan produksi perikanan -1,09 % dari yang direncanakan hingga 2026, capaian produksi perikanan sangat positif dan menunjukkan tren yang baik.

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Tingkat capaian terhadap target sebesar -1,09%, yang berarti realisasi produksi perikanan telah mendekati target yang ditetapkan untuk periode tersebut.
- 2) Indikator kinerja: Hasil ini menunjukkan bahwa sektor perikanan berkembang dengan baik dan melebihi ekspektasi dalam rencana strategis.
- 3) Capaian produksi perikanan sangat positif dan menunjukkan tren yang baik, jika tren ini berlanjut, target 2026 dapat direvisi untuk lebih ambisius atau fokus pada keberlanjutan produksi.
- 4) Tingkat kemajuan produksi perikanan dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kemajuan} &= \frac{\text{Realisasi 2025} - \text{Target 2025}}{\text{Target 2025}} \times 100 \% \\
 &= \frac{61.323,11 - 62.000}{62.000} \times 100 \% \\
 &= - 1,09 \%
 \end{aligned}$$

- 5) Artinya, kemajuan produksi perikanan menurun dari target sebesar 1,09% lebih cepat dari yang direncanakan hingga 2026.

d. **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Perikanan dengan Standar Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Dengan Standar Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	61.323,11	503.063,13	6.946.871 *

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**) estimasi KKP RI*

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator Jumlah Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31
Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran 4

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	62.000	61.323,11	98,91	- kinerja sektor perikanan relatif stabil dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan - Peningkatan produksi perikanan budidaya - Dukungan Program dan sarana prasarana - Stabilitas produksi secara umum - Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar	- Penguatan Sektor Budidaya (Strategi Penyangga produksi) - Stabilitas produksi tangkap - Penguatan kontribusi terhadap PDRB

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan

sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.

Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, kapal jukung dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut :

Tabel 3.32
Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

No	Jenis Bantuan yang diberikan	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025
			DAK	APBD	DAK	APBD	APBD	APBD
1	Jaring	Pcs	65	564	1220	57	63	
2	Mesin Tempel 15 PK	Unit	10	56	24	26	75	
3	Mesin Tempel 40 PK	Unit	-	20	-	20	34	
4	Mesin Long Tail	Unit	-	25	-	13	24	
5	Fish Box	Unit	-	-	-	-	13	
6	GPS	Unit	-	-	-	3	-	
7	Perahu Fiber	Paket	7	-	14	-	-	
	Jumlah		76	665	1258	119	209	

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari bantuan yang diberikan kepada nelayan memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin dan perahu fiber jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan GPS, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan, serta fish Box memudahkan nelayan untuk menyimpak hasil tangkapannya. Hal ini dapat dilihat hasil produuksi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
	Ikan Laut				
1	Alu-alu Sirip Hitam; Barakuda Sirip Hitam (Sphyræna tiburo)	Ton	219,59	194,20	413,78
2	Bawal Hitam (Parastromateus niger)	Ton	34,04	28,04	62,08
3	Belanak (Chelon subviridis)	Ton	92,94	79,57	172,52
4	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	Ton	3.173,66	3.049,51	6.223,17
5	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	Ton	122,52	159,15	281,67
6	Gerot-gerot (Pomadasys andamanensis)	Ton	140,39	120,90	261,29
7	Gulamah (Gymnocranius griseus)	Ton	34,54	28,65	63,19

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
8	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	Ton	181,23	184,55	365,78
9	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	Ton	3.479,59	3.064,92	6.544,51
10	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	Ton	226,78	191,13	417,90
11	Kuniran; Biji Nangka (<i>Parupeneus cyclostomus</i>)	Ton	584,52	592,30	1.176,82
12	Kurisi (<i>Pentapodus setosus</i>)	Ton	329,66	267,80	597,46
13	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	Ton	663,53	593,59	1.257,12
14	Kuwe (<i>Carangoides armatus</i>)	Ton	1.357,04	1.205,56	2.562,59
15	Layang (<i>Decapterus maruadsi</i>)	Ton	431,49	362,57	794,06
16	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	Ton	485,12	437,75	922,87
17	Lemadang (<i>Coryphaena hippurus</i>)	Ton	182,23	185,51	367,75
18	Lidah (<i>Cynoglossus arel</i>)	Ton	77,17	66,01	143,18
19	Manyung Besar (<i>Arius thalassinus</i>)	Ton	400,62	332,50	733,12
20	Pari Babi (<i>Taeniura meyeni</i>)	Ton	15,35	14,17	29,52
21	Peperek Bondolan (<i>Leiognathus bindus</i>)	Ton	658,85	537,22	1.196,08
22	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	Ton	209,12	191,59	400,71
23	Sotong (<i>Pharaoh cuttlefish</i>)	Ton	119,37	119,37	238,74
24	Swanggi (<i>Priacanthus hamrur</i>)	Ton	452,70	350,13	802,83
25	Tembang (<i>Sardinella gibbosa</i>)	Ton	460,70	362,65	823,35
26	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	Ton	490,11	467,46	957,57
27	Teri Indian (<i>Stolephorus indicus</i>)	Ton	3.795,68	3.535,88	7.331,55
28	Tetengkek (<i>Megalaspis cordyla</i>)	Ton	156,26	149,74	306,00
29	Tongkol (<i>Auxis thazard</i>)	Ton	5.088,39	5.183,36	10.271,76
30	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (<i>Thunnus albacares</i>)	Ton	133,91	124,31	258,22
31	Udang Jerbung (<i>Penaeus merguensis</i>)	Ton	54,94	45,72	100,66
32	Udang Windu (<i>Panaeus monodon</i>)	Ton	134,31	122,55	256,86
	Ikan Darat (PUD)				
33	Belut Sawah; Remang Sawah (<i>Strophidon sathete</i>)	Ton	11,61	11,56	23,17
34	Betok (<i>Anabas testudineus</i>)	Ton	10,07	9,78	19,84
35	Gabus (<i>Channa striata</i>)	Ton	8,61	8,38	16,99
36	Gurame; Gurami (<i>Osphronemus goramy</i>)	Ton	0,56	0,54	1,10
37	Lele (<i>Clarias batrachus</i>)	Ton	5,66	5,53	11,19
38	Mujair (<i>Oreochromis mossambicus</i>)	Ton	1,00	0,96	1,96
39	Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Ton	1,02	0,99	2,01
40	Nilem (<i>Osteochilus vittatus</i>)	Ton	1,26	1,21	2,47
41	Sepat Siam (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	Ton	1,65	1,58	3,23
42	Sidat (<i>Anguilla anguilla</i>)	Ton	7,71	7,60	15,31
43	Tawes (<i>Barbodes gonionotus</i>)	Ton	1,43	1,39	2,82
44	Udang Putih; Udang Api-api (<i>Metapenaeus eboracensis</i>)	Ton	2,80	2,73	5,54
	TOTAL	Ton	24.039,73	22.400,56	46.440,29

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 45.404,29 ton dengan tingkat capaian 97,60 %. Capaian indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena

berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan antara lain:

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.
2. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
 - b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan
4. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil skala kecil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan tangkap :

Faktor Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Dukungan anggaran dalam kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan.

Hambatan yang masih ditemui dalam Upaya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah : .

1. Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di perairan umum.
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative
5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.

7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

Upaya ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis jumlah produksi perikanan antara lain :

1. Peningkatan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

Produksi perikanan Budidaya tahun 2025 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu Lele, Nila, Gurame, Udang Vaname, Ikam Mas dan Kerapu dan lain-lain. Dalam 3 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut

Tabel 3.34
Bantuan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Tahun 2022, 2023, 2024

NO	JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN	Satuan	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele	Unit	1	-	-	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias	Unit	1	-	-	-
3	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele	Paket	3	3	1	-
4	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila	Paket	4	3	-	-
5	Bantuan Benih dan Pakan Ikan Gurame	Paket	1	12	1	-
6	Pembuatan Kolam	Unit	-	-	1	-
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (Pembuatan Kolam, Benih dan Pakan)	Unit	1	-	-	-
8	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Lele	Paket	1	-	-	-
9	Pengadaan Calon Induk dan Prasarana Pembenihan Ikan Hias	Paket	1	-	-	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Paket	2	-	-	-
11	Pengadaan Calon Induk Nila	Paket	-	-	-	1
Total			15	18	3	1

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024

Dari bantuan yang diberikan kepada pembudidaya ikan memberikan dampak positif meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya perjenis ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35
Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Dinas Perikanan dan Pangan
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Jenis Data	Satuan	TOTAL S 1	TOTAL S 2	TOTAL 2024
1	Ikan Mas	Ton	351,870	347,300	699,170
2	Nila	Ton	2.584,680	2.081,900	4.666,580
3	Gurame	Ton	1.539,000	1.441,200	2.980,200
4	Lele	Ton	2.502,400	2.336,200	4.838,600
5	Kerapu	Ton	20,710	14,780	35,490
6	Udang Vaname	Ton	371,400	762,300	1.133,700
	Total		7.370,06	6.983,680	14.353,740

Tabel 3.36
PRODUKSI BENIH IKAN
BBI PINCURAN BOGA TAHUN 2025

Januari sd Desember 2025

No	Tanggal	Tujuan	Nama	Jenis	Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (ekor)			Jumlah PAD (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)	JUMLAH	Ket.
							Lele	Nila	Gurami				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02/01/2025	IV Jurai	Rianto Saputra	Benih	3-5 cm	160		5.000		5.000	Rp-	Rp800.000	Bantuan
2	04/03/2025	Salido Kec. IV Jurai	Rio	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000	Rp-	Rp800.000	Bantuan
3	04/03/2025	IV Jurai	Ardidal	Benih	3-5 cm	160	5.000			5.000	Rp-	Rp800.000	Bantuan
4	05/03/2025	Bayang	Ari	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
5	17/04/2025	Langgai Kec. Sutera	Ali Mainus	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
6	19/04/2025	Inderapura	Winda	Benih	3-6 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
7	10/06/2025	IV Jurai	Adi	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
8	12/06/2025	IV Jurai	Joni	Benih	3-6 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
8	13/06/2025	Tarusan	Penta Pranata	Benih	3-5 cm	160	10.000			10.000	Rp-	Rp1.600.000	Bantuan
9	Retribusi		Retribusi	Benih	3-5 cm	160	-	-		-	Rp-	Rp-	
10				Benih	2-3 cm	100	70.000	15.000		85.000	Rp8.500.000	Rp-	PAD
11		Bayang	Ferdi		3-6 cm	160	10.000			10.000		Rp1.600.000	Bantuan
12	18/07/2025	Bayang	Harmen		3-6 cm	160	10.000			10.000		Rp1.600.000	Bantuan
	25/07/2026	Painan	Ari		3-6 cm	160		5.000		5.000		Rp800.000	Bantuan
13	25/07/2025	Inderapura	Indah		3-6 cm	160	5.000			5.000		Rp800.000	Bantuan
14	07/08/2025	Inderapura	Dani		3-6 cm	160	10.000			10.000		Rp1.600.000	Bantuan
15	09/08/2025	Punggasan	Ujang		3-6 cm	160	10.000			10.000		Rp1.600.000	Bantuan
16	10/09/2025	Tarusan	Rafi		3-6 cm	160	5.000			5.000		Rp800.000	Bantuan
17	13/10/205	Painan	Sunu		3-6 cm	160		5.000		5.000		Rp800.000	Bantuan
	13/10/2025	Kambang	Joni		3-6 cm	160	5.000			5.000		Rp800.000	Bantuan
		IV Jurai	Adika		3-6 cm	160	5.000			5.000		Rp800.000	Bantuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IV Jurai	Tambak Langkisau		3-6 cm	160	3.000			3.000		Rp480.000	Bantuan
Total							203.000	30.000	-	233.000	8.500.000	22.400.000	

Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga milik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang tahun 2025 melakukan pembibitan Ikan Nila dan Ikan Lele, yang menghasilkan sebanyak 233.000 benih. Dari semua benih tersebut sebagian besar diberikan ke kelompok pembudidaya ikan yaitu sebanyak 148.000 benih dan 85.000 benih dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian produksi Perikanan Budidaya dapat dilihat bahwa target produksi perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 12.618 ton dan realisasi sebesar 14.092 Ton atau dengan capaian 111,68 %. Pada tahun 2022 target produksi perikanan Budidaya yaitu 13.913, realisasi sebesar 14.278 ton atau dengan capaian 107,76 %. Sedangkan untuk tahun 2023 target produksi perikanan Budidaya sebesar 13.913 ton dengan realisasi 14.490 ton. Pada tahun 2024 target produksi perikanan Budidaya 14.608 ton dengan realisasi sebesar 14.759,14 ton dengan capaian sebesar 101,04 %. Dan Pada tahun 2025 target produksi perikanan Budidaya 15.478 ton dengan realisasi sebesar 15.918,82 ton dengan capaian sebesar 102,85 %.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan budidaya :

Hambatan yang dihadapi dari capaian sasaran strategis

1. Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
3. Kurangnya permodalan pembudidaya untuk pengembangan budidaya ikan
4. Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya
5. rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan
6. Masih sulitnya pemasaran membuat pembudidaya kurang berkembang karena masih bersifat lokal.
7. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2025, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
8. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif

Upaya yang dilakukan

1. Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pembudidaya ikan
2. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
3. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha
4. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan,temu tekans hama dan penyakit ikan
5. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat. Pendampingan oleh tenaga pendamping Badan Layanan Umum Lembaga

Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) agar pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal

6. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

Untuk mempertahankan keberhasilan ini dan mengatasi tantangan di masa depan, diperlukan upaya optimalisasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya PDRB Sektor unggulan dengan indicator kinerja jumlah produksi perikanan, perlunya sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.37
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis 4

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan adalah sebesar Rp. 2.602.069.080,- dan terealisasi Rp. 2.215.118.787,- atau 85,13%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,87 % dan realisasi fisik 100 % dengan dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38
Dukungan Kegiatan APBD untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 4

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD TAHUN 2025	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan	%	Fisik (%)	
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.277.080.884	1.974.289.512	86,70	100,00	302.791.372
12	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.585.450	5.505.090	98,56	100,00	80.360
	29 Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.585.450	5.505.090	98,56	100,00	80.360
13	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.271.495.434	1.968.784.422	86,67	100,00	302.711.012
	30 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.271.495.434	1.968.784.422	86,67	100,00	302.711.012
E	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	324.988.196	240.829.275	74,10	100,00	84.158.921
14	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	9.317.800	9.167.334	98,39	100,00	150.466
	31 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9.317.800	9.167.334	98,39	100,00	150.466
15	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	315.670.396	231.661.941	73,39	100,00	84.008.455
	32 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.692.596	216.823.459	72,11	100,00	83.869.137
	33 Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.977.800	14.838.482	99,07	100,00	139.318
	JUMLAH	2.602.069.080	2.215.118.787	85,13	100,00	386.950.293

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(2.602.069.080 \times 98,91\%) - 2.215.118.787}{(2.602.069.080 \times 98,91\%)} \times 100\% \\ &= 13,93 \% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui efisiensi bahwa dalam penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah 13,93% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan analisis terdapat keselarasan dalam pencapaian target pernyataan kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada sasaran 4. Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2025 melaksanakan 2 program sebagai berikut :

Tabel 3.39
Program Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.277.080.884	1.974.289.512	86,70
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	324.988.196	240.829.275	74,10
	Jumlah	2.602.069.080	2.215.118.787	85,13

Capaian Sasaran strategis 4 didukung oleh Beberapa Program yaitu:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil Perikanan ini juga penentu dalam peningkatan Produksi Perikanan sebab tanpa didukung oleh sarana prasarana yang cukup maka dapat mempengaruhi Produksi Perikanan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.602.069.080,- dengan realisasi Rp. 2.215.118.787,- dan didukung 2 (dua) Sub kegiatan berikut ini:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

Sub Kegiatan ini bertujuan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang bersumber dari Dana APBD/APBD-P. Dari pagu anggaran Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.271.495.434,00- (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).- terealisasi belanja sebesar Rp. 1.974.289.512.- (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh*

empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).-

atau terealisasi keuangan sebesar 86,70 % dari pagu anggaran dan realisasi fisik kegiatan 100%, dengan rincian belanja dan realisasi fisik kegiatan 100% , rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan pada Kegiatan ini adalah :

1. Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan 40 PK

- Nomor Kontrak : 523/01/APBD/DPP-PS/VII-2025
- Tanggal : 30 Juli 2024
- Pekerjaan : Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan 40 PK (APBD)
- Penyedia : PT. KARYA BAHARI ABADI
- Nilai Kontrak : Rp. 1.468.599.989,- (*Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*)
- Masa Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
- Tanggal Pelaksanaan : 30 Juli s/d 28 September 2025

Berikut Kelompok dan nama penerima Mesin Tempel 15 PK tersebut ;

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Koperasi Riak Mandeh (Riyan Antoni)	Kampung : Tangah Nagari : Mandeh Kecamatan : Koto XI Tarusan	1 unit	28.500.000.-
2.	Kelompok Nelayan Cinta Bahari (Rusdi, Mardi Antos, Mesra Can)	Kampung : Sungai Nyalo Nagari : Sungai Nyalo Mudiak Aie Kecamatan : Koto XI Tarusan	3 unit	85.500.000.-
3.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Riak Pantai Batu Kalang (Syafrizal)	Kampung : Batu Kalang Nagari : Ampang Pulai Kecamatan : Koto XI Tarusan	1 unit	28.500.000.-
4.	Peerkumpulan Kelompok Nelayan Dunsanak Jaya Basamo (Zainal Abidin, Nofrimil)	Kampung : Limau Asam Nagari : Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan : Bayang	2 unit	57.000.000.-
5.	Perkumpulan Nelayan Pasia Muaro (Shandi Maita Saputra, Jumri Ilyas)	Kampung : Painan Selatan Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	2 unit	57.000.000.-
6.	Perkumpulan Nelayan Biduak Tongga (Abimayu Suradi)	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	1 unit	28.500.000.-
7.	Koperasi Bangkit Bersama (Deki Suprianto, Nofendi)	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	2 unit	57.000.000.-
8.	Kelompok Nelayan Jaring Ikan Batu Panjang (Gilang Juliandika, Adrimanto, Safrisal, Andi)	Kampung : Koto Nagari : Salido Kecamatan : IV Jurai	4 unit	114.000.000.-
9.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Rumpun Bahari Carocok Painan (Yoserizal)	Kampung : Carocok Painan Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	1 unit	28.500.000.-
10.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Tunas Baru (Indra Gunawan, Erman, Putra Andrian, Hendri Sufriandi, Harirul Amri, Hendrii Idria, Hasan Basri, Erwin)	Kampung : Teluk Kasai Nagari : Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan : Batang Kapas	8 unit	228.000.000.-

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
11.	Kelompok Nelayan Pantai Muaro Bukit Tambun Tulang (Erman)	Kampung : Muaro Bukit Tambun Tulang Nagari : IV Koto Hilie Kecamatan : Batang Kapas	1 unit	28.500.000.-
12.	Perkumpulan Nelayan Semangat Baru Maju (Asril, Marsis Can, Iyal)	Kampung : Padang Tae Nagari : Ampiang Parak Kecamatan : Sutera	3 unit	85.500.000.-
13.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Ketek Tangka (Alpriansanto)	Kampung : Padang Tae Nagari : Ampiang Parak Kecamatan : Sutera	1 unit	28.500.000.-
14.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Samudera Ilahi Kampung Ujung Air Nagari Ampiang Parak (Dedi Irawan)	Kampung : Ujung Air Nagari : Ampiang Parak Kecamatan : Sutera	1 unit	28.500.000.-
15.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Air Takapung Parak Lelo (Yalfi Zulkasih)	Kampung : Surantih Nagari : Surantih Kecamatan : Sutera	1 unit	28.500.000.-
16.	Kelompok Usaha Bersama SEHATI (Hendri Zoni)	Kampung : Padang Marapalam Nagari : Lakitan Utara Kecamatan : Lengayang	1 unit	28.500.000.-
17.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Koto Raya Indah Surantih (Yoni Putra Mardoni)	Kampung : Koto Raya Nagari : Lakitan Selatan Kecamatan : Lengayang	1 unit	28.500.000.-
18.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Padang Pasir Pasar Lama (Gusri Roki, Syafrijon, Ilik, Muknizen, Siin)	Kampung : Pasar Lama Nagari : Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan : Linggo Sari Baganti	5 unit	142.500.000.-
19.	Perkumpulan Ombak Pantai Selatan (Ben Suhendri Putra, Yudi Saputra, Afrizal)	Kampung : Airpilah Nagari : Pulau Rajo Indrapura Kecamatan : Airpura	3 unit	85.500.000.-
20.	KUB Permata Batang Tindih (Pison, Aidil Fitri)	Kampung : Batang Tindih Nagari : Pulau Rajo Indrapura Kecamatan : Airpura	2 unit	57.000.000.-
21.	Perkumpulan Pulau Rajo Indah (Amril, Zainal Arifin)	Kampung : Batang Tindih Nagari : Pulau Rajo Indrapura Kecamatan : Airpura	2 unit	57.000.000.-
22.	Perkumpulan Kilau Cahaya Air Uba (Nopi, Deni Saputra)	Kampung : Airpilah Nagari : Pulau Rajo Indrapura Kecamatan : Airpura	2 unit	57.000.000.-
	J u m l a h		48 unit	1.368.000.000.-

Dan berikut Kelompok dan nama penerima Mesin Tempel 40 PK tersebut ;

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Ketek Tangka (Gema Jenius)	Kampung : Padang Tae Nagari : Ampiang Parak Kecamatan	1 unit	50.300.000.-
2.	Kelompok Usaha Bersama Sehati (Joni Afandi)	Kampung : Padang Marapalam Nagari : Lakitan Utara Kecamatan : Lengayang	1 unit	50.300.000.-
	J u m l a h		2 unit	100.600.000.-

2. Pengadaan Mesin Long Tail Honda GX 390 + AS KKK Lengkap (set)

- Nomor Kontrak : 523/02/APBD/DPP-PS/X-2025
- Tanggal : 03 Oktober 2025
- Pekerjaan : Pengadaan Mesin Long Tail (APBD)

- Penyedia : PT. AZZA MITRA UTAMA
- Nilai Kontrak : Rp. 190.234.575,- (*Seratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- Masa Pelaksanaan : 50 (Lima Puluh) Hari kalender
- Tanggal Pelaksanaan : 03 Oktober s/d 22 November 2025

Berikut Kelompok dan nama penerima Mesin Long Tail tersebut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Koperasi Bangkit Bersama (Hendrizal, Ahmad, Fadri)	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	3 unit	38.046.915.-
2.	Kelompok Nelayan Jaring Ikan Batu Panjang (Ari Satril Sofiandi, Andi Mawardi, Wendo Fernando, Afrinaldi, Jon Kanedi, Rudi Putra Andesko, Joni Efendi, Safrudin, Nasrul, Azirman, Syafrudin, Nasrilario)	Kampung : Koto Nagari : Salido Kecamatan : IV Jurai	12 unit	152.187.660.-
	J u m l a h		15 unit	190.234.575.-

3. Pengadaan Jaring Monofilamen

- Nomor Kontrak : 523/04/APBD/DPP-PS/X-2025
- Tanggal : 03 Oktober 2025
- Pekerjaan : Pengadaan Jaring Monofilamen (APBD)
- Penyedia : PT. AZZA MITRA UTAMA
- Nilai Kontrak : Rp. 42.124.500,- (*Empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*)
- Masa Pelaksanaan : 50 (Lima Puluh) Hari Kalender
- Tanggal Pelaksanaan : 03 Oktober s/d 22 November 2025

Berikut Kelompok dan nama penerima Jaring Monofilamen tersebut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Kelompok Ikan Baru	Kampung : Sungai Sirah Nagari : Surantih Kecamatan : Sutera		
	Penerima :			
	Kamlis		10 pieces	8.42.900.-
	Amril		10 pieces	8.42.900.-
	Syahrul Rinaldi		10 pieces	8.42.900.-
	Erel		10 pieces	8.42.900.-
	Tamril		10 pieces	8.42.900.-
	J u m l a h		50 piece	42.124.500.-

4. Pengadaan Cool Box 550 kg

- Nomor Kontrak : 523/03/APBD/DPP-PS/X-2025
- Tanggal : 03 Oktober 2025
- Pekerjaan : Pengadaan Cool Box 550 Kg (APBD)
- Penyedia : PT. AZZA MITRA UTAMA
- Nilai Kontrak : Rp. 138.298.230,- (*Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*)
- Masa Pelaksanaan : 50 (Lima Puluh) Hari Kalender

- Tanggal Pelaksanaan : 03 Oktober s/d 22 November 2025

Berikut Kelompok dan nama penerima Cool box 550 Kg tersebut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Muaro Takapung Sepakat Penerima : Yose Rizal Randi Harlendra Antos Diputra Andri	Kampung : Timbulun Nagari : Aur Duri Surantih Kecamatan : Sutera	17 unit 4 unit 4 unit 5 unit 4 unit	75.400.000.- 32.540.760.- 32.540.760.- 40.675.950.- 32.540.760.-
	J u m l a h		17 unit	75.400.000

5. Pengadaan Cool Box 200 liter

- Nomor Kontrak : 523/06/APBD/DPP-PS/X-2025

- Tanggal : 06 Oktober 2025

- Pekerjaan : Pengadaan Cool Box 220 Liter (APBD)

- Penyedia : PT. AZZA MITRA UTAMA

- Nilai Kontrak : Rp. 19.065.360,- (*Sembilan belas juta enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah*)

- Masa Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

- Tanggal Pelaksanaan : 6 Oktober s/d 5 Desember 2025

Berikut Kelompok dan nama penerima Cool Box 220 Liter tersebut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Perkumpulan Nelayan Pasia Muaro Penerima : Erinaldianto Shandi Maita Saputra Aldo Septilas Faindra	Kampung : Painan Selatan Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	3 unit 1 unit 1 unit 1 unit	3.010.320.- 1.003.440.- 1.003.440.- 1.003.440.-
2.	Perkumpulan Nelayan Biduak Tongga Penerima : Jadmiko Abimayu Suradi	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	2 unit 1 unit 1 unit	2.006.880.- 1.003.440.- 1.003.440.-
3.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Maju Bersama Pulau Rajo Penerima : Nofrizal Sulva Hendri Amril Piles Siswandi Amril Erlangga Lindo Laktama Ijen Saputra Genta Agusti Poni Andesta	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	14 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 2 unit	14.048.160.- 2.006.880.- 1.003.440.- 1.003.440.- 2.006.880.- 1.003.440.- 2.006.880.- 1.003.440.- 2.006.880.- 2.006.880.-
	J u m l a h		19 unit	19.065.360.-

SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN KECIL

Dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025 ini juga dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil

Kabupaten Pesisir Selatan. Pelatihan dilaksanakan 1 (satu) hari pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 di Hotel Hannah Painan Jl. Illyas Yacub - Painan.

Narasumber pada pelatihan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kejaksaan Negeri Painan
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Painan

Peserta pada pelatihan tersebut berjumlah 45 orang nelayan yang merupakan nelayan penerima Hibah Barang melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Peserta tersebut terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1) Kecamatan Koto XI Tarusan | : 5 orang |
| 2) Kecamatan Bayang | : 2 orang |
| 3) Kecamatan IV Jurai | : 9 orang |
| 4) Kecamatan Batang Kapas | : 4 orang |
| 5) Kecamatan Sutera | : 4 orang |
| 6) Kecamatan Lengayang | : 2 orang |
| 7) Kecamatan Ranah Pesisir | : 5 orang |
| 8) Kecamatan Linggo Sari Baganti | : 5 orang |
| 9) Kecamatan Airpura | : 9 orang |

6. PENYERAHAN BANTUAN APBN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2025

Dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025 ini juga dilaksanakan penyerahan bantuan yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

A. Bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Bantuan Mesin Kapal Penangkapan Ikan berupa Mesin Tempel 15 PK dengan penerima sebagai berikut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Nomor Mesin	Jumlah
1.	Kelompok Nelayan Saiyo Sakato	Kampung : Sungai Talang Nagari : Kapuah Utara Kecamatan : Koto XI Tarusan		9 unit
	Penerima :			
	1. Mahendri, A.Md		E15 DMH L 1491658	1 unit
	2. Deswin		E15 DMH L 1516866	1 unit
	3. Ramli		E15 DMH L 1516822	1 unit
	4. Gusmanto		E15 DMH L 1516855	1 unit
	5. M. Yusuf		E15 DMH L 1516819	1 unit
	6. Afrizal		E15 DMH L 1516923	1 unit
	7. Amrizal		E15 DMH L 1516817	1 unit
	8. Martoni		E15 DMH L 1516865	1 unit
	9. Yori Saputra		E15 DMH L 1516921	1 unit
	Jumlah			9 unit

2. Bantuan Alat Penangkapan Ikan (API) berupa Jaring Insang Monofilamen 2 inci Ø 0.25 dengan penerima sebagai berikut :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1.	Koperasi Cahaya Air Pilah	Kampung : Air Pilah Nagari : PulauRajo Indrapura Kecamatan : Airpura	50 unit
	Penerima :		
	1. Asrul		5 unit
	2. Marjais Indra		5 unit
	3. Tomi Saputra		5 unit
	4. Jos Mindra		5 unit
	5. Mardiono		5 unit
	6. Deli. S		5 unit
	7. Eriando		5 unit
	8. Dendi Putra Indah		5 unit
	9. Erianto		5 unit
	10. Erik Kalces		5 unit
2.	KUB Kilau Cahaya Air Uba	Kampung : Air Pilah Nagari : PulauRajo Indrapura Kecamatan : Airpura	50 unit
	Penerima :		
	1. Nasrul		5 unit
	2. Hendra Nopika		5 unit
	3. Nopi		5 unit
	4. Naswilian Pebi Saputra		5 unit
	5. Jamasli		5 unit
	6. Rehan		5 unit
	7. Dodi		5 unit
	8. Naswilian Angga Saputra		5 unit
	9. Sharil G		5 unit
	10. Redi		5 unit
3.	KUB Ombak Pantai Selatan	Kampung : Air Pilah Nagari : PulauRajo Indrapura Kecamatan : Airpura	50 unit
	Penerima :		
	1. Remon Oski		5 unit
	2. Yudi Saputra		5 unit
	3. Busri		5 unit
	4. Ben Suhendri P		5 unit
	5. Afrizal		5 unit

6. Diki Januari		5 unit
7. Areal		5 unit
8. Syarial		5 unit
9. Haripal Atoso		5 unit
10. Windi Saputra		5 unit
Jumlah		150 unit

B. Bantuan yang bersumber dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Bantuan Mesin Tempel 8 PK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada :

No.	Kelompok dan Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Kapar Saiyo (Rahmat Efendi, Rama Saputra, Yeyen Nofrizal)	Kampung : Karang Pauh Nagari : Gurun Panjang Selatan Kecamatan : Bayang	3 unit
2.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Dabua Ombak Batu Sikabau (Yandre Candra Putra, Sabarudin, Dani Rodes)	Kampung : Batu Kalang Nagari : Ampang Pulaui Kecamatan : Koto XI Tarusan	3 unit
	Jumlah		6 unit

2. Bantuan Fish Box 100 liter dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada :

No.	Kelompok Penerima	Alamat	Nama Penerima	Jumlah (Unit)
1.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Taluak Manjuto	Kampung : Sungai Pinang Nagari : Mandeh Kecamatan : Koto XI Tarusan	1. Diandes Vico	2
			2. Wahyum Nulkarim	2
			3. Asrori	2
			4. Rindo	2
			5. Afrial	2
			Jumlah	10
2.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Riak Pantai Batu Kalang	Kampung : Batu Kalang Nagari : Ampang Pulaui Kecamatan : Koto XI Tarusan	1. Syafrizal	3
			2. Beni Gusti Pratama	2
			3. Anggi Pratama	2
			4. Jakaruddin	2
			5. Jumarno	2
			6. Dicky Pranata	2
			Jumlah	13
3.	Kelompok Perikanan Ombak Karang Sunip	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Kecamatan : IV Jurai	1. Voni Purnama Putra	2
			2. Novianto	2
			3. Bambang Surizal	2
			4. Oktarizal	2
			5. Juli Andre Saputra	2
			6. Arif	2
			7. Irwandi	2
			8. Wandrianto	2
			Jumlah	16

4.	Perkumpulan Kelompok Perikanan Mutiar Laut Kampung Padang Tae	Kampung : Padang Tae Nagari : Ampiang Parak Kecamatan : Sutera	1. Mardelison	4
			2. Edi Sanjaya	4
			3. Iwen	2
			4. Irwan Susndi	4
			5. Danil	2
			6. Ravi Zulfaqrda	4
			7. Hendrizal Fedro	4
			8. Al Hudri	4
			Jumlah	28
5.	Kelompok Perikanan Nelayan Indah Pasir	Kampung : Pasar Surantih Nagari : Surantih Kecamatan : Sutera	1. Feris Novebrianto	1
			2. Roki Desembri	2
			3. Saprianto	1
	Palanggahan		4. Asril	2
			5. Tio Afrizal	1
			6. Nofringga Jul Putra	1
			7. Anggi	1
			8. Yal Idris	1
			9. Adisman	1
			10. Difa Efendi	1
			11. Olon	1
			12. Yoges Vebrianl	1
			Jumlah	14
6.	Kelompok Nelayan Pasia Kalamuntiang Kampung Sungai Sirah	Kampung : Pasar Surantih Nagari : Surantih Kecamatan : Sutera	1. Jasmal	2
			2. Romi Nofi Muslim	2
			3. Yori Aprizaldi	1
			4. Peri	1
			5. Siswanto	1
			6. Kadir	1
			7. Amrizal	1
			8. Yunus	1
			9. Usman	1
			10. Juli	1
			Jumlah	12
7.	Kelompok Nelayan Mutiar Kampung Karang Tengah	Kampung : Karang Tengah Nagari : Lakitan Selatan Kecamatan : Lengayang	1. Masrul	2
			2. Malis	2
			3. Maryedi	2
			4. Peri	2
			5. Yusuf	2
			6. Syamsuir	2
			7. Ujung Pagai	2
			8. Ujung	2
			9. Puri	2
			10. Erdiwal Dasman	2
			11. Ramilis	2
			12. Ison	2
			Jumlah	24
8.	Koperasi Serba Usaha Kato Nan Basamo	Kampung : Palangai Nagari : Nyiur Melambai	1. Deri Deska Putra	2
			2. Masril	2

		Kecamatan : Ranah Pesisir	3. Taher	2
			4. Ilus	2
			5. Alagusman	2
			6. Ali Umar	2
			Jumlah	12
9.	Perkumpulan Nelayan Padang Pasir Pasar Lama	Kampung : Pasar Lama Nagari : Pasar LamaMuara Air Haji Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Sarimandianto	2
			2. Engki	4
			3. Unjuik	2
			4. Anton	2
			5. Riri Hartono	2
			6. Engki Tarnado	2
			Jumlah	14

No.	Kelompok Penerima	Alamat	Nama Penerima	Jumlah (Unit)
10.	Perkumpulan Kelompok Usaha Bersama Ujuang Batiang Saiyo	Kampung : Muara Kandis Nagari : Muara Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Peri Suriadi	4
			2. Nasir	4
			3. Idel	4
			4. Ison	4
			5. Saprianto	4
			6. Edo Delianto	4
			7. Joni	4
			8. Piki	4
			9. Ijon	2
			10. Batri	2
			Jumlah	36
		J u m l a h		179

3. Bantuan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring hijau 2 1/4 inchi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada :

No.	Kelompok Penerima	Alamat	Nama Penerima	Jumlah (piece)
1.	Koperasi Bangkit Bersama	Kampung : Sungai Nipah Nagari : Painan Selatan Painan Kecamata : IV Jurai	1. Joniwar	10
			2. Zul Pandri	10
			3. Asril	10
			4. Sofian	10
			5. Handrizal	10
			6. Desmar	10
			7. Jasmin	10
			8. Arisukma	10
			9. Nofriyanto	10
			10. Dodi Tokori	10
			11. Devi Hendrianto	10
			Jumlah	110

4. Bantuan Mesin Kapal Penangkapan Ikan berupa Mesin Tempel 15 PK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada :

No.	Kelompok dan Alamat Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
1.	Kelompok Nelayan Samudera Carocok Kampung : Carocok Nagari : Painan Selatan Painan Kecamatan : IV Jurai	1. Syamsul Bahri	E15MDHL 1519290	1 unit
		Jumlah		1 unit
No.	Kelompok dan Alamat Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
2.	Perkumpulan Perikanan Harapan Nelayan Lansano Indah II Kampung : Lansano Nagari : Lansano Taratak Kecamatan : Sutera	1. Inef	E15MDHL 1504145	1 unit
		2. Ranggi	E15MDHL 1504147	1 unit
		Jumlah		2 unit
3.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Kasiak Putiah Babatu Kampung : Pasar Gompong Nagari : Kambang Barat Kecamatan : Lengayang	1. Syahrizal	E15MDHL 1504153	1 unit
		2. Soni Indra	E15MDHL 1504212	1 unit
		Jumlah		2 unit
4.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Lumuik Liar Karla Kampung : Padang Marapalam Nagari : Lakitan Utara Kecamatan : Lengayang	1. Pisriadi	E15MDHL 1504079	1 unit
		2. Firman	E15MDHL 1504081	1 unit
		Jumlah		2 unit
5.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Laut Biru Lakitan Selatan Kampung : Lubuk Begalung Nagari : Lakitan Selatan Kecamatan : Lengayang	1. Joni	E15MDHL 1504075	1 unit
		2. Idon Syahputra	E15MDHL 1504077	1 unit
		Jumlah		2 unit
6.	Perkumpulan Kelompok Anak Nelayan Kampung Padang Marapalam Kampung : Padang Marapalam Nagari : Lakitan Utara Kecamatan : Lengayang	1. Net Marson	E15MDHL 1504060	1 unit
		2. Lingga Jepalko	E15MDHL 1504073	1 unit
		Jumlah		2 unit
7.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Dua Pasang Kampung : Padang Marapalam Nagari : Lakitan Utara Kecamatan : Lengayang	1. Dori Syahputra	E15MDHL 1500258	1 unit
		2. Zulkiffi	E15MDHL 1500358	1 unit
		Jumlah		2 unit
8.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Ombak Badabu Kampung : Sumedang Nagari : Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan : Ranah Pesisir	1. Nedi Gampo	E15MDHL 1504149	1 unit
		2. Yulianto Atmanegara	E15MDHL 1504151	1 unit
		Jumlah		2 unit
No.	Kelompok dan Alamat Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
9.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Tiga Saudara Muara Kandis Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muaro Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Rega Ananda Putra	E15MDHL 1491455	1 unit
		Jumlah		1 unit
10.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Padang	1. Hendri	E15MDHL 1491457	1 unit

	Pasir Pasar Lama Kampung : Pasar Lama Nagari : Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan : Linggo Sari Baganti	2. Riri Hartono	E15MDHL 1491479	1 unit
		3. Anton	E15MDHL 1491481	1 unit
		4. Malus	E15MDHL 1491483	1 unit
		Jumlah		4 unit
11.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Danau Kembar Muaro Kandis Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muaro Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Syafrianto	E15MDHL 1500250	1 unit
		2. Rudi	E15MDHL 1500252	1 unit
		Jumlah		2 unit
12.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Pantai Linggo Sejahtera Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muaro Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Saldi Putra	E15MDHL 1500254	1 unit
		2. Syafri. M	E15MDHL 1500256	1 unit
		Jumlah		2 unit
13.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Putra Pantai Sepakat Kampung : Labuhan Tanjak Nagari : Air Haji Barat Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Abasri	E15MDHL 1491545	1 unit
		Jumlah		1 unit
		Jumlah		26 unit

5. Bantuan Mesin Kapal Penangkapan Ikan berupa Mesin Tempel 40 PK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diserahkan kepada :

No.	Kelompok Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
1.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Payang Elok Saba Kampung : Samudera Surantih Nagari : Surantih Kecamatan : Sutera	1. Mardianto Kampai	E40JMHL 1112139	1 unit
		Jumlah		1 unit
No.	Kelompok Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
2.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Muaro Jambu Indah Punggasan Utara Kampung : Tanddikat Air Jambu Nagari : Punggasan Utara Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Inal	E40JMHL 1112140	1 unit
		Jumlah		1 unit
3.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Yellowfin Tuna Sirip Kuning Kampung : Muara Kandis Nagari : Muara Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Amril	E40JMHL 1112141	1 unit
		Jumlah		1 unit
4.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Gadang Family Saiyo Kampung Muaro Air Haji Kampung : Muaro Air Haji Nagari : Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Hendriandi	E40JMHL 1112142	1 unit
		Jumlah		1 unit
4.	Perkumpulan Ayia Kasai Sakato	1. Ison	E40JMHL 1112143	1 unit
	Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muara Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	2. Erman	E40JMHL 1112151	1 unit
		Jumlah		2 unit
5.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Tiga	1. Paredi	E40JMHL 1112126	1 unit

	Saudara Muara Kandis Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muaro Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti			
		Jumlah		1 unit
6.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Subang-Subang Saiyo Kampung : Harapan Jaya Nagari : Muara Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Jeki Tornado	E40JMHL 1112127	1 unit
		Jumlah		1 unit
7.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Payang Rahit Sepakat Kampung : Kambeh Nagari : Ampang Pulaui Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Mardi	E40JMHL 1112128	1 unit
		Jumlah		1 unit
No.	Kelompok Penerima	Nama Penerima	Nomor Mesin	Jumlah
8.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Kamari Bedo Kampung : Muaro Kandis Nagari : Muaro Kandis Punggasan Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Supradianto	E40JMHL 1112129	1 unit
		Jumlah		1 unit
9.	Perkumpulan Kelompok Nelayan Putra Pantai Sepakat Kampung : Labuhan Tanjak Nagari : Air Haji Barat Kecamatan : Linggo Sari Baganti	1. Hasmizon	E40JMHL 1111048	1 unit
		2. Darmansyah	E40JMHL 1111057	1 unit
		Jumlah		2 unit
	J u m l a h			12 unit

DOKUMENTASI KEGIATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENYERAHAN HIBAH BARANG (MESIN TEMPEL 15 PK DAN 40 PK) APBD DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2025 OLEH BAPAK BUPATI PESISIR SELATAN





2. PENYERAHAN HIBAH BARANG MESIN LONG TAIL HONDA GX 390 + AS KKK LENGKAP (SET) APBD DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIRIR SELATAN TA 2025 OLEH BAPAK BUPATI PESIRIR SELATAN





3. PENYERAHAN HIBAH BARANG (JARING MONOFILAMEN) APBD DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TA 2025 OLEH BAPAK BUPATI PESIR SELATAN





4. PENYERAHAN HIBAH BARANG (COOLBOX 500 KG) APBD DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2025 OLEH BAPAK BUPATI PESISIR SELATAN



5. PENYERAHAN HIBAH BARANG (COOLBOX 220 LITER) APBD DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2025 OLEH BAPAK BUPATI PESISIR SELATAN



6. PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN KECIL ANGGARAN APBD TA 2025



7. PENYERAHAN BANTUAN MESIN KAPAL PENANGKAPAN IKAN (MESIN TEMPEL 15 PK)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



8. PENYERAHAN BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG MONOFILAMEN
2 INCI Ø 0.25 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





9. PENYERAHAN BANTUAN APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2025



B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya baik diperairan umum atau kolam, Pagu anggaran sebesar Rp. 324.988.196,- dengan realisasi anggaran Rp. 240.829.275.- yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan budidaya, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan.

1. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Sub Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 9.317.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.167.334.- atau 98.38 %.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

- Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :Pengadaan Benur dan pakan Udang Vaname. : 2 kelompok
- Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :Pengadaan Benih dan pakan ikan gurame :1 kelompok

- Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Peninjauan budidaya kerapu, kakap dan lobster di sungai bungin : 3 kelompok
- Pendampingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Peninjauan budidaya kerapu, kakap dan lobster di sungai bungin : 3 kelompok
- Peninjauan lokasi budidaya penangkaran penyu di Nagari amping Parak : 1 kelompok
- Pembinaan UPR dan Pokdakan : 10 kelompok.

Dokumentasi Penyerahan bantuan Benur dan Pakan Udang Vaname:



Dokumentasi Penyerahan bantuan Benur dan Pakan Udang Vaname:



II. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan Budidaya, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan Meningkatkan Produksi Perikanan, Pendapatan dan Kesejahteraan Kelompok Pembudidaya, Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 300.692.596,- dengan realisasi anggaran Rp. 216.823.459,- atau 72.11 %. Rendahnya realisasi dikarenakan oleh batalnya Kampung Nelayan Merah Putih Sektor Perikanan Budidaya, sehingga semua dana yang terkait KNMP bisa tidak direalisasikan dan lulusnya 2 orang tenaga honorer menjadi PPPK, antara lain :

- Biaya penyusunan UKL/UPL sebesar Rp.50.000.000,-
- Makanan dan minuman rapat Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih Rp.10.824.000,-
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara : Rp.13.900.000
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum tidak bisa direalisasikan sebesar Rp.8.000.000,- karena 2 tenaga honorer sudah lulus PPPK

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga dan pembinaan ke kelompok budidaya.

Kegiatan yang dilakukan di BBI Pincuran Boga yaitu melaksanakan kegiatan pembenihan mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, pendederan dan panen benih untuk di jual. Selain untuk dijual ada juga yang didistribusikan untuk bantuan – bantuan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan dan Pangan.

- a) Bantuan yang diserahkan ke masyarakat Bantuan Benih Ikan Nila sebanyak 15.000 ekor dan Benih Lele sebanyak 133.000 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Penjualan Benih Ikan Nila sebanyak 15.000 ekor dan Benih Lele sebanyak 70.000 ekor sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8.500.000,-.

Dokumentasi Bantuan Benih Ikan Lele Untuk Pokdakan Pokdakan Parak Lele sebanyak 10.000 ekor benih ikan Lele:



Strategi Jangka Panjang untuk Keberlanjutan dan Pertumbuhan Sektor Perikanan

Agar keberhasilan dalam produksi perikanan tetap berlanjut dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang, diperlukan strategi yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, teknologi, dan sosial. Berikut adalah strategi jangka panjang yang dapat diterapkan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

A. Penerapan Sistem Kuota dan Zonasi Perikanan

- Menetapkan kuota tangkapan ikan berdasarkan analisis stok ikan untuk mencegah overfishing.
- Menerapkan zona konservasi di wilayah-wilayah perairan tertentu untuk

pemulihan ekosistem laut.

- Membangun sistem pengawasan perikanan berbasis satelit untuk mencegah penangkapan ilegal (IUU Fishing).

B. Penguatan Budidaya Perikanan Berkelanjutan

- Mengembangkan perikanan budidaya berbasis ekologi untuk mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap.
- Mendorong penerapan teknologi bioflok dan aquaponik agar produksi lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Menyediakan insentif bagi pembudidaya ikan yang menerapkan praktik ramah lingkungan

2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

A. Modernisasi Teknologi Perikanan

- Meningkatkan penggunaan sistem informasi perikanan berbasis AI dan IoT untuk membantu nelayan menentukan daerah tangkapan potensial.
- Mengembangkan kapal perikanan bertenaga listrik atau hybrid untuk mengurangi konsumsi BBM dan emisi karbon.

B. Pembangunan Infrastruktur Rantai Pasok

- Memperluas cold storage dan pelabuhan perikanan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
- Mengembangkan fasilitas pengolahan ikan terintegrasi agar produk perikanan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
- Meningkatkan jaringan distribusi ke daerah-daerah potensial untuk memperluas pasar.

3. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

A. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

- Memberikan subsidi BBM dan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing nelayan kecil.
- Mendorong pembentukan koperasi nelayan agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih baik di pasar.
- Menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja sektor

perikanan.

B. Pelatihan dan Pendidikan Perikanan

- Mengadakan program pelatihan teknis tentang budidaya, pengolahan ikan, dan pemasaran digital.
- Mengembangkan kurikulum pendidikan perikanan berbasis teknologi dan inovasi untuk generasi muda.
- Mendorong kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan inovasi di sektor perikanan.

4. Ekspansi Pasar dan Diversifikasi Produk Perikanan

A. Penguatan Ekspor dan Standarisasi Produk

- Meningkatkan standar kualitas dan keamanan pangan agar produk perikanan dapat bersaing di pasar global.
- Memperluas akses pasar ekspor ke negara-negara dengan permintaan tinggi seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

B. Pengembangan Produk Olahan Berdaya Saing

- Mendorong industri pengolahan ikan untuk menciptakan produk inovatif seperti nugget ikan, abon ikan, dan suplemen berbasis ikan.
- Mengembangkan branding dan promosi digital untuk meningkatkan daya tarik produk perikanan di pasar domestik maupun internasional.

C. Optimalisasi Pemanfaatan E-commerce dan Digital Marketing

- Mendorong nelayan dan pembudidaya ikan untuk memanfaatkan platform e-commerce dalam penjualan hasil perikanan.
- Membantu UMKM sektor perikanan dalam pemasaran digital agar produk mereka lebih dikenal.

Keberhasilan capaian produksi perikanan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, tantangan keberlanjutan tetap harus diantisipasi agar pertumbuhan ini tidak hanya sementara.

Solusi yang perlu dilakukan meliputi pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan nelayan, serta ekspansi pasar. Dengan pendekatan yang komprehensif, produksi perikanan dapat terus meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya.

Dengan strategi jangka panjang yang mencakup pengelolaan berkelanjutan, peningkatan teknologi, pemberdayaan nelayan, serta ekspansi pasar, sektor perikanan dapat terus berkembang tanpa mengorbankan ekosistem laut.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perikanan secara berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2025. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui APBD tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar sebesar **Rp. 8.308.535.732,-** (Delapan milyar tiga ratus delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran
1.	Belanja Operasional	8.293.815.732	7.676.579.136	92,56	617.236.596	7,44
2.	Belanja Modal	14.720.000	13.100.000	88,99	1.620.050	11,01
	Jumlah	8.308.535.732	7.689.679.136	92,55	618.856.596	7,45

Sumber :Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 8.308.535.732,-** (Delapan milyar tiga ratus delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 7.689.679.136,-** (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar **92,55 %**, dengan efisiensi anggaran sebesar **7,45 %**, seperti tercantum pada tabel 3.44.

Tabel 3.41
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Belanja		
							Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	A (81,50)	A (81,46)	99,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.237.355.519	5.076.251.438	96,92
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.421.545	60.504.777	93,92
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.513.975	38.273.728	94,47
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.907.570	22.231.049	92,99
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.401.884.362	4.323.120.054	98,21
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.177.513.872	4.118.848.550	98,60
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.430.000	190.582.480	90,57
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.940.490	13.689.024	98,20
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.989.750	1.372.260	68,97
						Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.989.750	1.372.260	68,97
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	3.000.000	66,67
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	3.000.000	66,67
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.910.808	214.353.829	84,09
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.892.671	8.854.350	59,45
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.720.000	13.100.000	88,99
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.671.401	34.807.360	85,58
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.001.966	22.780.710	91,12
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	4.104.000	76,00
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.000.000	2.074.680	51,87
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.870.000	124.760.368	85,53
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.354.770	3.872.361	88,92
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.611.004	226.782.612	90,85
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.000	74.573.822	79,67
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.011.004	152.208.790	97,56
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.038.050	247.117.906	95,03
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.700.000	45.861.174	80,88
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.880.050	122.026.732	98,50
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.450.000	28.450.000	100,00
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.008.000	50.780.000	99,55
2	Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	93	93	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	51.072.694	44.295.069	86,73
						Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5.384.000	5.333.800	99,07
						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	5.384.000	5.333.800	99,07
						Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	11.604.894	11.151.731	96,10
						Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	11.604.894	11.151.731	96,10
						Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri			81,59

						Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	34.083.800	27.809.538	
						Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.083.800	27.809.538	81,59
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	87	88,2	101,37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	356.816.346	296.935.902	83,22
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	138.935.200	107.393.671	77,30
						Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.814.500	18.561.221	85,09
						Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	80.637.800	56.505.850	70,07
						Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	36.482.900	32.326.600	88,61
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	167.057.300	139.427.933	83,46
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	142.056.900	130.534.660	91,89
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	25.000.400	8.893.273	35,57
						Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	50.823.846	50.114.298	98,60
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.823.846	50.114.298	98,60
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.987.200	40.230.000	93,59
						Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	42.987.200	40.230.000	93,59
						Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	42.987.200	40.230.000	93,59
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	18.234.893	16.847.940	92,39
						Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	18.234.893	16.847.940	92,39
						Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupat+B45:B58en/Kota	18.234.893	16.847.940	92,39
4	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	50.694	60.942,69	120,22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.277.080.884	1.974.289.512	86,70
						Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.585.450	5.505.090	98,56
						Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.585.450	5.505.090	98,56
						Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.271.495.434	1.968.784.422	86,67
						Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.271.495.434	1.968.784.422	86,67
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	324.988.196	240.829.275	74,10
						Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	9.317.800	9.167.334	98,39
						Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9.317.800	9.167.334	98,39
						Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	315.670.396	231.661.941	73,39
						Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.692.596	216.823.459	72,11
						Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.977.800	14.838.482	99,07
						TOTAL	7.982.467.089	7.446.681.293	92,55

Sumber :Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja, Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Ke 4 (empat) sasaran strategis, rata-rata mendekati target tahun 2025 dengan capaian di atas 91 % namun masih dalam predikat **sangat baik** dengan rincian :

- 1) sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan capaian 99,91 %.
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan capaian 91,00 %.
- 3) sasaran meningkatnya ekonomi Masyarakat miskin dan rentan miskin dengan capaian 99,63 %.
- 4) Sasaran meningkatnya PDRB Sektor unggulan dengan capaian 98,91 %.

b. Capaian Indikator

Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai 4 (empat) Indikator kinerja sasaran pada tahun 2025. Capaian masing-masing indikator kinerja yaitu

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perikanan dan Pangan realisasi dengan nilai 81,60 (A) dari target 82,00 (A) atau dengan predikat “ baik”.
2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 91 dari target nilai 100. pemanfaatan inovasi dalam kegiatan Sosialisasi Gemarikan, karena penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

3. Hasil pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi 88,17 dari target yang ditetapkan 88.50 atau dengan capaian 99,63 %. hal ini menunjukkan bahwa semakin beragamnya pangan yang dikonsumsi Masyarakat.
4. Produksi Perikanan dengan realisasi 61.323,11 Ton dari target 62.000 Ton dengan capaian 98,91 %.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 97,26% dengan predikat “ **sangat baik**”

c. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Perikanan dan Pangan pada Tahun Anggaran 2025 adalah **Rp. 8.308.535.732,- (Delapan milyar tiga ratus delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 7.689.679.136,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** atau sebesar **92,55 %**, dengan efisiensi anggaran sebesar **7,45 %**.

Secara umum sasaran yang telah disusun dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dengan persentasi capaian 4 indikator dengan predikat **sangat baik**, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemui sejumlah **kendala/permasalahan –permasalahan** sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan pangan lokal oleh Masyarakat Pesisir Selatan masih sebatas makanan pendamping belum bisa menjadi makanan pengganti beras dan terigu
- 2) Faktor ekonomi dan inflasi, Masyarakat miskin seringkali menghadapi kendala daya beli terhadap bahan pangan yang berkualitas.
- 3) Distribusi pangan yang tidak merata, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas.
- 4) Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu

- 5) Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
- 6) Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
- 7) Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas
- 8) Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
- 9) Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.
- 10) Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya dan nelayan.

Upaya kedepan yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana serta modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap
- 2) Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan
- 3) Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan
- 4) Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya
- 5) Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan

4.2 Saran

Dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan :

1. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
3. Perlunya peningkatan kompetensi Sumberdaya ASN Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan baik bidang perikanan maupun bidang pangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Diharapkan dapat menambah informasi/data penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRDAUS, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan
Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

**PIHAK KEDUA
BUPATI PESIR SELATAN**

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**



(**FIRDAUS, S.Pi., M.Si**)

NIB 1970621 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan	A (82,00)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5
4	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Produksi Perikanan	62.000

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.496.798.093	-
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 389.459.683	-
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 32.999.750	-
	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 25.000.247	-
4	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 2.241.606.868	-
5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 633.603.766	-
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 120.010.914	-
Jumlah		Rp 8.939.479.321	

Pihak Kedua
BUPATI PESISIR SELATAN

(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.)

Painan, 20 Januari 2025
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



(IRMAUS, S.Pi., M.Si)

00621 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**

Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Firdaus, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


FIRDAUS, S.Pi., M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Sekretaris
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan	- Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%
		- Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan,	0 Delay Laporan
		- Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91%-100% [Sangat Baik]

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.126.328.882	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 93.974.086	
	Sub Kegiatan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 63.432.056	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.542.030	
		Rp 204.668.440	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 192.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 12.628.440	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 11.999.750	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 11.999.750	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 367.072.319	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.882.196	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.720.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 39.999.851	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 23.725.502	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 239.700.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis	Rp 20.644.770	
		Rp 30.993.000	
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.993.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 97.405.800	
	Sub Kegiatan		
	Pengadaan Mebel	Rp 97.405.800	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 251.065.487	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 114.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 136.465.487	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp 69.150.000	
	Sub Kegiatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 19.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 49.200.000	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

(FIRDAUS, S.Pi., M.Si)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Sekretaris

(YOLLI KANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Yespi Nawiarsih**

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Firdaus, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN


FIRDAUS, S.Pi., M.Si.
NIP. 19700621 199303 1 006


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	86%
2.	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi	98%
		Persentase Ketersediaan Protein	98%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Gapoktan Lumbung Pangan yang aktif	85%

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket
I	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 279.458.984	
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Rp 94.458.884	
	Sub Kegiatan :		
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Rp 40.122.400	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp 39.336.500	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rp 14.999.984	
2.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 185.000.100	
	Sub Kegiatan :		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 150.000.100	
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 35.000.000	
II	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 32.999.750	
1.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 32.999.750	
	Sub Kegiatan:		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp 32.999.750	
	Jumlah	312.458.734	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

(FIRDAUS, S.Pi., M.Si)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi

(Drs. YESY NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Firdaus, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.Pi., M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46.522

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan		Keterangan Setelah Perubahan	
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap				
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	7.989.949	Rp	7.989.949
	Sub Kegiatan				
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp	7.989.949	Rp	7.989.949
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.467.298.458	Rp	4.567.298.358
	Sub Kegiatan				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp	4.460.026.458	Rp	4.560.026.358
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Rp	7.272.000	Rp	7.272.000
	Jumlah	Rp	4.475.288.407	Rp	4.575.288.307

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

(FIRDAUS, S.PI., M.Si)
NIP. 19700621 199303 1 006

(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Kasril, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Firdaus, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


FIRDAUS, S.Pi., M.Si.
NIP. 19700621 199303 1 006


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Konsumsi Energi	99,0%
2.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Konsumsi Protein	96,0%
2.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersedia	8,0%
		Persentase Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Pengolah dan Permasar Perikanan	0,23%
		Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Rp86.235.000.000
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	44,96

No.	Program	Anggaran	Keterangan
I.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 110.000.699	
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 30.001.100	
	Sub Kegiatan :		
	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Rp 30.001.100	
2.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 79.999.599	
	Sub Kegiatan		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Rp 79.999.599	
II.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 25.000.247	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	Rp 25.000.247	
	Sub Kegiatan :		
	Rekomendasi Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Rp 25.000.247	
I.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 120.010.914	
1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp 10.011.500	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan Resiko	Rp 10.011.500	
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan	Rp 19.999.144	
	Sub Kegiatan		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	Rp 19.999.144	
3.	Penyediaan dan Penyalurn Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam	Rp 90.000.270	
	Sub Kegiatan		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Jumlah	Rp 90.000.270	
		Rp 230.011.613	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

(FIRDAUS, S.Pi., M.Si)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan

(HANSIL, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Henri Susilowati, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Firdaus, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.Pi., M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	15.478

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 633.603.766	
1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 454.994.520	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp 419.999.770	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp 14.999.950	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 19.994.800	
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 178.609.246	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 148.609.806	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.999.440	
	Jumlah	633.603.766	

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan

(FIRDAUS, S.Pi., M.Si)
NIP. 19700621 199303 1 006

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

(HENRI SUSILOWATI, S.PI. M.Si.)
NIP. 19720905 199903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Randi Fitriadi, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RANDI FITRIADI, S.Pi., M.Si
NIP. 19920405 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 Dokumen
2.	Membantu menyiapkan Laporan perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan	Jumlah Laporan Yang disusun	6 Laporan
3.	Terlaksananya Penyelenggaraan Data dan Statistik Sektoral Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Statistik yang disusun	1 Dokumen

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan


(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan


(RANDI FITRIADI, S.Pi., M.Si)
NIP. 19920405 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Reni Susanti, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS

YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Pihak Pertama
PERENCANA AHLI MUDA

RENI SUSANTI, S.Pi., M.Si
NIP. 19750417 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan dan Pangan	4 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja	5 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 93.974.086	
	Sub Kegiatan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 63.432.056	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.542.030	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.391.637.651	
	Sub Kegiatan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.186.969.211	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 192.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 12.628.440	
	Jumlah	4.485.611.737	

Pihak Kedua
Sekretaris

(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
PERENCANA AHLI MUDA

(RENI SUSANTI, S.Pi., M.Si.)
NIP. 19750417 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maya Fitri Zuly, S.Pi**
Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011


MAYA FITRI ZULY, S.Pi
NIP. 19961230 202012 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan tepat waktu - Mengajukan Dana UP, GU dan TU - Menyiapkan bahan rekonsiliasi keuangan - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Perikanan dan
Pangan Kabupaten Pesisir

(YOLLIKANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(MAYA FITRI ZULY, S.PI.)
NIP. 19961230 202012 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eda Putri Santi, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011


EDA PUTRI SANTI, S.Pi
NIP. 19921001 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan tepat waktu - Mengajukan Dana UP, GU dan TU - Menyiapkan bahan rekonsiliasi keuangan - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran - Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Perikanan dan
Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

(YOLLIANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(EDA PUTRI SANTI, S.Pi)
NIP. 19921001 201903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Ermi Rahmasari**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS


YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 011

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


Ir. ERMI RAHMASARI
NIP. 19671008 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Dinas Perikanan dan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Dokumen
2.	Terlaksananya identifikasi, inventarisasi, Monitoring, evaluasi dan Pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Laporan PAD	12 Dokumen
3.	Terlaksananya Verifikasi Keuangan	Jumlah Laporan Kegiatan	1 dokumen

Pihak Kedua
Sekretaris


(YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.)
NIP. 19840723 200212 1 001

Painan, 21 Januari 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


(Ir. ERMI RAHMASARI)
NIP. 19671008 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Harmon Zamora**

Jabatan : **Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENATA SARANA DAN PRASARANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

HARMON ZAMORA
NIP. 19760704 200801 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu pelayanan administrasi Bidang Pemberdayaan Nelayan	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Tangkap	1 Dokumen
		Jumlah Rekomendasi BBM Bersubsidi Bagi Nelayan	1600 rekomendasi

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan
Nelayan



(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Pertama
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan



(HARMON ZAMORA)
NIP. 19760704 200801 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maria Desyanti, S.E**
Jabatan : **Pengelola Produksi Perikanan Tangkap**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

MARIA DESYANTI, SE
NIP. 19770317 200902 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
Bidang Pemberdayaan Nelayan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang mendapatkan layanan rekomendasi bahan bakar minyak	150

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan


(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 21 Januari 2025
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda


(MARIA DESYANTI, SE)
NIP. 19770317 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dewa Restu Rianto, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DEWA RESTU RIANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 19960514 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Silvina Granita, S.Pi**
Jabatan : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Afrikal, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN

AFRIKAL, SH
NIP. 19690510 199103 1 010

Pihak Pertama
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

SILVINA GRANITA, S.Pi
NIP. 19760627 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
Bidang Pemberdayaan Nelayan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat hasil tangkapannya	52 Orang
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Pendapatannya	52 Orang

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan



(AFRIKAL, SH)
NIP. 19690510 199103 1 010

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda



(SILVINA GRANITA, S.PI.)
NIP. 19760627 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lukman**

Jabatan : Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Henri Susilowati, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA**

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Pihak Pertama
**PENATA SARANA DAN PRASARANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LUKMAN
NIP. 19681017 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu pelayanan administrasi Bidang Perikanan Budidaya	Jumlah pelayanan administrasi yang dilakukan - data Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya - data kelompok pembudidaya ikan	1 dokumen 1 dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan



LUKMAN
NIP. 19681017 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Adiko Zunandi, S.Pi**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Henri Susilowati, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA**

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Pihak Pertama
**PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ADIKO ZUNANDI, S.Pi
NIP. 19890522 201903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan pelayanan administrasi seksi Pembenihandan Pembesaran Ikan	Jumlah Laporan produksi benih ikan bermutu	12 Laporan
		SPJ kegiatan	12 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perikanan Budidaya


HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan


ADIKO ZUNANDI, S.Pi
NIP. 19890522 201903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Susilawati, S.Pi**
Jabatan : **Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Henri Susilowati, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Perikanan Budidaya**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PERIKANAN BUDIDAYA

HENRI SUSILOWATI, S.Pi., M.Si
NIP. 19720905 199303 2 003

Pihak Pertama
PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA

SUSILAWATI, S.Pi
NIP. 19810704 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	10 Kelompok

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perikanan Budidaya



(HENRI SUSILOWATI, S.Pi. M.Si.)
NIP. 19720905 199903 2 003

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA



(SUSILOWATI, S.Pi.)
NIP. 19810704 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Roza Lina Alda, SKM**
Jabatan : **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

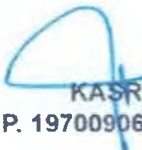
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001


ROZA LINA ALDA, SKM
NIP. 19760325 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklajhsar) yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang
2.	Meningkatkannya Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi PSAT	5 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


(KASIH, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


(ROZA LINA ALDA, SKM.)
NIP. 19760325 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Merlyn Syahputri**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


MERLYN SYAHPUTRI
NIP. 19840803 201001 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu meningkatkan pelayanan administrasi bidang konsumsi dan keamanan pangan	Jumlah pelayanan administrasi - SPJ Kegiatan	6 Dokumen

**Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan**


(KASRI, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001

Painan, 21 Januari 2025
**Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran**


MERLYN SYAH PUTRI
NIP. 19840803 201001 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln.Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Pinto Haprialdy**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001

Pihak Pertama
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


PINTO HAPRIALDY
NIP. 19830429 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Pengolahan Data Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-Jumlah laporan data yang disusun	1 Laporan

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan


(KASHIL, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


PINTO HAPRIALDY
NIP. 19830429 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aspatuti, S.Pt**
Jabatan : **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


KASRIL, SH
NIP. 19700506 200012 1 001

Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA


ASPATUTI, S.Pt
NIP. 19731001 200701 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan 1. Umbi-umbian 2. Protein Hewani 3. Kacang-kacangan 4. Sayur dan buah	1,4% 11,5% 2,4% 6,1%
2	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah keluarga yang memperoleh layanan peningkatan ketahanan pangan	40 keluarga

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


(KASRIL, SH)
 NIP. 19700906 200012 1 001

Painan, 21 Januari 2025
 Pihak Pertama
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda


(ASPATUTI, S.Pt.)
 NIP. 19731001 200701 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gusti Ayu Wulandari, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

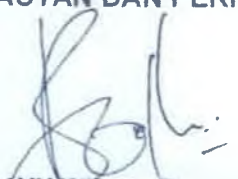
PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001

Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN


GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si
NIP. 19930822 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dalam penerapan peningkatan kualitas mutu dan keamanan produk perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.	Jumlah laporan pembinaan penerapan standar mutu hasil perikanan	6 Dokumen
2.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan.	Jumlah laporan Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan (Gemarikan)	6 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi
dan Keamanan Pangan


(KARRIL, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan


(GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi., M.Si)
NIP. 19930822 201903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hoki Kurniawan, S.Pi**
Jabatan : Penata Kelola Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kasril, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN


KASRIL, SH
NIP. 19700906 200012 1 001

Pihak Pertama
PENATA KELOLA
KELAUTAN DAN PERIKANAN


HOKI KURNIAWAN, S.Pi
NIP. 19910213 202012 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Jabatan Pengelola Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu Melakukan Penyelesaian Administrasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) yang Meningkatkan Pendapatannya	60 Orang
2.	Membantu Melakukan Penyelesaian Administrasi ~~Pengawasan Keamanan Pangan~~	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Teregistrasi Keamanan ~~Pangan Segar~~	5 Pelaku Usaha
3	Membantu Penyelesaian Administrasi Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah masyarakat yang diedukasi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	60 Orang dan 200 Pelajar

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


(KASIM, SH)
NIP. 19700906 200012 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Kelautan dan Perikanan


(HOKI KURNIAWAN, S. Pi)
NIP. 19910213 202012 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSI NORA MAI LIZA, S.IP**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

ROSI NORA MAI LIZA, S.IP
NIP. 19770502 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Pemerintah	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pelaporan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah laporan pengelolaan cadangan pangan	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan
dan Distribusi Pangan

(Drs. YESY NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(ROSI NORA MAI LIZA, S.IP)
NIP.19770502 200701 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aswita, S.ST**

Jabatan : **Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. Yespi Nawiarsih**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Pihak Pertama
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

ASWITA, S.ST
NIP. 19760912 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	99,5%
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Stok Cadangan Pangan	63%
3.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Penanganan Kerawanan Pangan	- Tersedianya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (FSVA)	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

(Drs. YESY NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 21 Januari 2025
Pihak Pertama
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda

(ASWITA, S.ST.)
NIP. 19760912 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hendra Syafutra, S.Pi**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. Yespi Nawiarsih**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

HENDRA SYAFUTRA, S.Pi
NIP. 19810216 201407 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Membantu Meningkatkan Pengelolaan Lumbung Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	10 kelompok lumbung pangan
2.	Membantu Meningkatkan Upaya Pencegahan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen

Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi
Pangan

(Drs. YEYU NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

(HENDRA SYAFUTRA, S.Pi.)
NIP. 19810216 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: dpp.pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nilam Sari Tanjung, SE.**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. Yespi Nawiarsih**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Pihak Pertama
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN

NILAM SARI TANJUNG, SE.
NIP. 19971209 202012 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi pada Seksi Distribusi Pangan	Jumlah Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan Distribusi Pangan	12 Laporan
2.	Terlaksana Pemantauan Harga Secara Berkala	Jumlah Laporan Pemantauan Pasar	12 Laporan

**Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketersediaan dan
Distribusi Pangan**

(Drs. YESP NAWIARSIH)
NIP.19681017 198903 1 003

Painan, 21 Januari 2025

**Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan**

(NILAM SARI TANJUNG, SE.)
NIP.19971209 202012 2 005



RENCANA AKSI TRI WULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

RENCANA AKSI TRIWULAN IV
PEBANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan dan Pangan
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN										KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				Program	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV							TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3					5	6	7	8	9	10		11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

SASARAN											KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				Program	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA AKSI	RENCANA												REALISASI												PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			TR I	TR II	TR III	TR IV							TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

